

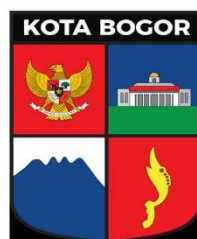


KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*



# DOKUMEN 1 ANALISIS STRATEGIS SMART CITY KOTA BOGOR



PEMERINTAH KOTA BOGOR

2022

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tentang Kota Bogor.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
2. ANALISIS MASA DEPAN.....	7
2.1. Analisis Visi Pembangunan Daerah.....	7
2.1.1. Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD.....	7
2.1.2. Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dimensi <i>Smart City</i> .....	10
2.1.3. Analisis Perilaku, Harapan Masyarakat dan <i>Stakeholder</i> Daerah.....	15
2.1.4. Analisis Daya Saing Daerah.....	15
2.1.5. Analisis Kelembagaan dan Pemerintah Daerah yang Relevan dengan Kebutuhan Seluruh <i>Stakeholder</i> yang Ada.....	22
2.2. Analisis Kondisi Eksternal.....	23
2.2.1. Analisis Tren dan Perkembangan Politik.....	23
2.2.2. Analisis Tren dan Perkembangan Ekonomi.....	29
2.2.3. Analisis Tren dan Perkembangan Sosial.....	34
2.2.4. Analisis Tren dan Perkembangan Teknologi.....	42
2.2.5. Analisis Tren dan Perkembangan Lingkungan.....	46
2.2.6. Analisis Tren dan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan.....	49
3. ANALISIS KESIAPAN DAERAH.....	52
3.1. Analisis Nature.....	52
3.1.1 Kondisi Geografi dan Demografi.....	53
3.2. Analisis Struktur.....	59
3.2.1. Analisis Kualitas SDM Daerah.....	59
3.2.2. Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan.....	60

3.3.	Analisis Infrastruktur .....	64
3.4.	Analisis Suprastruktur (Kebijakan dan Kelembagaan) .....	67
3.5.	Analisis Culture .....	70
4.	ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY .....	71
4.1.	Analisis Gap (Kesenjangan).....	71
4.2.	Analisis SWOT .....	78
4.3.	Analisis SWOT untuk Setiap Dimensi.....	78
4.3.1.	Analisis TOWS Smart Governance .....	78
4.3.2.	Analisis TOWS <i>Smart Branding</i> .....	81
4.3.3.	Analisis TOWS <i>Smart Economy</i> .....	84
4.3.4.	Analisis TOWS Smart Living .....	87
4.3.5.	Analisis TOWS Smart Society.....	90
4.3.6.	Analisis TOWS <i>Smart Environment</i> .....	92
5.	ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY .....	94
5.1.	Visi dan Misi Smart City .....	94
5.1.1.	Visi Smart City kota Bogor.....	94
5.1.2.	Misi Smart City kota Bogor .....	98
5.2.	Sasaran Smart City Daerah .....	98
6.	PENUTUP.....	107

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dimensi Smart City .....	13
Tabel 2. 2 Harapan Masyarakat .....	15
Tabel 2. 3 Analisis Daya Saing dalam Aspek Ekosistem Inovasi.....	17
Tabel 2. 4 Analisis Daya Saing dalam Aspek Penguat .....	18
Tabel 2. 5 Analisis Daya Saing dalam Aspek Pasar .....	19
Tabel 2. 6 Analisis Daya Saing dalam Aspek Sumber Daya Manusia .....	21
Tabel 2. 7 Perangkat Daerah.....	22
Tabel 3. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor.....	54
Tabel 3. 2 Luas Perubahan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Per Kelurahan di Kota Bogor .....	58
Tabel 3. 3 Analisis Kualitas SDM Daerah.....	59
Tabel 3. 4 Analisis Kualitas SDM Pemerintahan .....	61
Tabel 3. 5 Analisis Kapasitas Keuangan Daerah .....	63
Tabel 3. 6. Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah .....	64
Tabel 3. 7 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah.....	65
Tabel 3. 8. Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah .....	67
Tabel 3. 9 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah .....	68
Tabel 3. 10. Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah .....	69
Tabel 3. 11 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah .....	70
Tabel 4. 1 Analisis Kesenjangan (Gap) Kota Bogor.....	72
Tabel 4. 2 TOWS Smart Governance .....	78
Tabel 4. 3 TOWS Smart Branding.....	81
Tabel 4. 4 TOWS Smart Economy .....	84
Tabel 4. 5 TOWS Smart Living.....	87
Tabel 4. 6 TOWS Smart Society .....	90
Tabel 4. 7 TOWS Smart Environment.....	92
Tabel 5. 2 Sasaran Smart City Kota Bogor.....	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kota Bogor .....	4
Gambar 2. 1 Dimensi Smart City .....	10
Gambar 2. 2 Sinergi Program Mendukung Transformasi Digital .....	25
Gambar 2. 3 Tampilan situs Simata .....	26
Gambar 2. 4 Tampilan situs web LAPOR! Kota Bogor .....	28
Gambar 2. 5 Tampilan situs web SiBadra .....	28
Gambar 2. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (year-on-year) 2019-2022 .....	29
Gambar 2. 7 Perkembangan Inflasi Umum (month-to-month) 2017-2022 .....	30
Gambar 2. 8 .....	32
Gambar 2. 9 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Jawa Barat dan Kota Bogor .....	35
Gambar 2. 10 Usia Harapan Hidup Indonesia, Jawa Barat dan Kota Bogor .....	36
Gambar 2. 11 .....	37
Gambar 2. 12 .....	37
Gambar 2. 13 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan untuk Indonesia, Jawa Barat dan Kota Bogor .....	38
Gambar 2. 14 Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan Indonesia, Jawa Barat dan Kota Bogor .....	39
Gambar 2. 15 Indeks Keparahan Kemiskinan di Perkotaan Indonesia, Perkotaan Jawa Barat dan Kota Bogor .....	40
Gambar 2. 16 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Perkotaan Indonesia, Perkotaan Jawa Barat dan Kota Bogor .....	40
Gambar 2. 17 Dashboard Banjir Jakarta dari Jakarta Smart City .....	45
Gambar 2. 18 Hubungan antara standar ISO 37120 dan 37122 .....	51
Gambar 3. 1 Aspek Kesiapan Smart City Daerah .....	52
Gambar 3. 2 Peta Wilayah Kota Bogor .....	54
Gambar 3. 3 Aspek yang mempengaruhi Potensi Pengembangan Wilayah .....	58

# 1. PENDAHULUAN

---

## 1.1. Latar Belakang

Kota-kota di seluruh dunia semakin bertambah modern, kota harus merangkul teknologi baru dan menyikapi kedatangan era big data. Strategi bisnis baru akan segera bermunculan, dan perlu mengandalkan kolaborasi. Kota pintar atau *smart city* lambat laun akan mengubah kompetisi menjadi kolaborasi. Tren persaingan dunia adalah menuju daya saing kota atau daerah. Kota perlu menjadi pilihan masyarakat global dalam melakukan aktivitas investasi, perdagangan, wisata, kemitraan dan lain-lain. Pada saat yang sama, masyarakat harus mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang layak (*livable*), inovatif dan berkelanjutan (*sustainable*). Tuntutan sebuah kota atau lingkungan yang nyaman, aman, sehat, mudah, dan berkemakmuran menjadi indikator kota yang berdaya-saing.

Berbicara mengenai teknologi, sangatlah erat dengan digitalisasi yang menjadi *enabler* urbanisasi. Dunia digital melebur migrasi fisik pola rural ke urban, perubahan gaya hidup dan interaksi *socio-cultural* adalah contoh nyata bagaimana digitalisasi berperan dalam perubahan. Masyarakat urban memiliki sistem kompleks di mana manusia, teknologi, dan lingkungan saling terhubung dan mempengaruhi. Masyarakat urban membawa tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, kriminalitas, berkurangnya sumber daya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan lainnya. Kota Bogor sudah semakin berubah. Saat ini Kota Bogor sudah menjadi magnet di kawasan Jabodetabekpunjur yang menyedot kaum urban dari berbagai wilayah Indonesia, sehingga membawa berbagai konsekuensi terhadap berbagai aspek sebagaimana umumnya situasi perkotaan, oleh karena itu perlu strategi dan pendekatan komprehensif, inklusif, efektif dan efisien untuk menghadapi tantangan tersebut. Salah satunya adalah membangun *Smart City*

*Smart City* menghubungkan manusia, sosial, dan infrastruktur TIK untuk mengatasi masalah publik, mencapai pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup warganya. *Smart City* menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan hidup,

kemampuan kerja, dan keberlanjutannya (Smart City Council, 2014). Konsep Smart City merupakan konsep yang unik dan dinamis. Ide yang muncul dari Smart City adalah solusi untuk permasalahan kota, menjadi unik dan dinamis karena solusi yang muncul tidak serta merta bisa diterapkan di kota lain. Ide dan Inovasi harus bisa diterapkan untuk memudahkan penyelesaian masalah dengan melibatkan pemanfaatan teknologi TIK, IoT (sensor) dan *data analytics* sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan yang tepat. Pembangunan berbasis *Smart City* menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain.

Kota Bogor telah memulai pembangunan *Smart City* sejak tahun 2017 dan memiliki panduan untuk mempersiapkan dan mengimplementasikan pembangunan *Smart City* dengan baik yang sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki Kota Bogor. Perbaikan dan peningkatan layanan yang menghadirkan layanan digital berbasis kebutuhan masyarakat terus dilakukan, mengacu kepada tiga aspek penting *Smart City* yaitu, efisien, transparansi dan partisipasi. Kota Bogor berkomitmen membangun *Smart City* dan terus berproses menemukan pilihan dan konsep *Smart City* yang sesuai dengan Kota Bogor. *Smart City* harus membawa pelayanan publik lebih efisien dan transparan dan mendapatkan kontrol yang baik dari publik dalam setiap kegiatan, penggunaan APBD dan lainnya. Komitmen Kota Bogor dalam membangun *Smart City* menjadi latar belakang disusunnya Dokumen Rencana Induk 1 (*Masterplan Smart City*) Kota Bogor.

## 1.2. Tentang Kota Bogor

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor cukup strategis berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor dan sangat dekat Ibukota Negara. Lokasi strategis mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

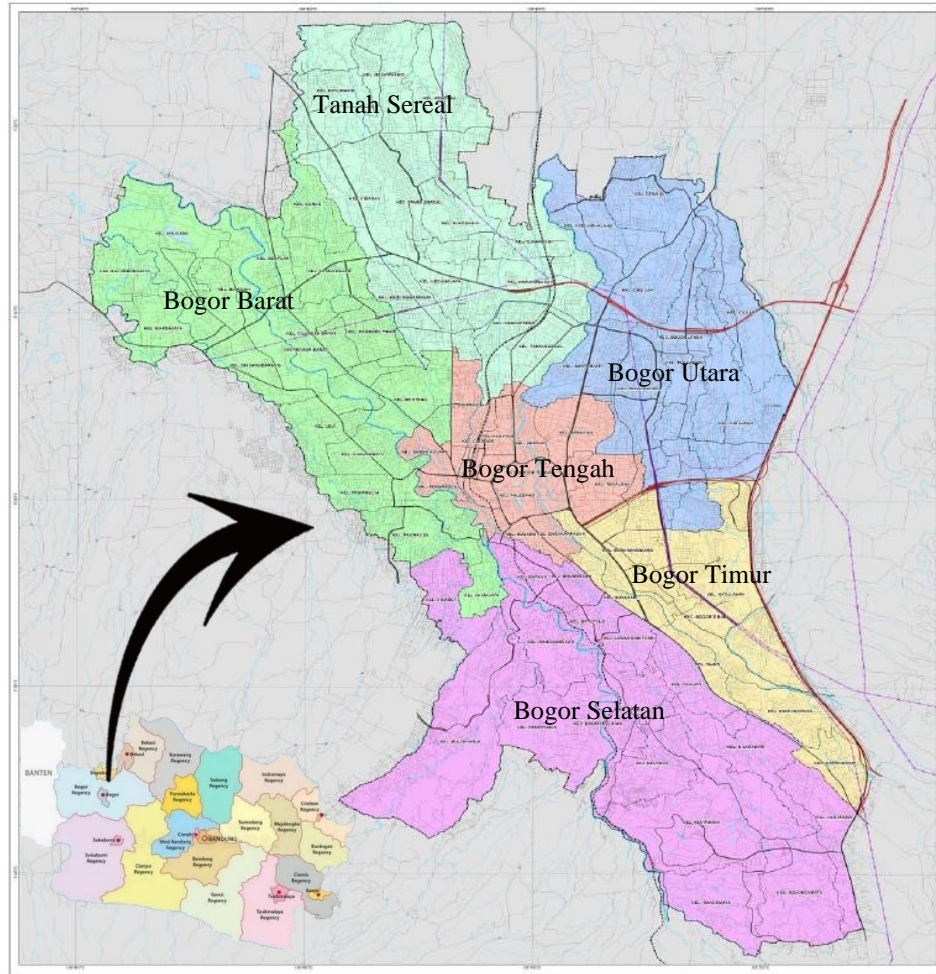
Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut, dengan kondisi iklim yang memiliki suhu rata-rata tiap bulan 26° C dengan suhu terendah 21,8° C dengan suhu tertinggi 30,4° C. Kelembaban udara 70 %, Curah hujan rata-rata

setiap tahun sekitar 3.500 – 4.000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari.

Luas Wilayah Kota bogor sebesar 11.850 Hektar terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan, 800 RW, 3.636 RT dan dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor (Gambar 1.1), yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan). Cijeruk dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.





Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kota Bogor

Sumber: RPJMD Kota Bogor 2019-2024

Kota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam Pemerintahan, mengingat sejak zaman Kerajaan Pajajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada seperti dari Prasasti Batu Tulis, nama-nama kampung seperti Lawanggintung, Lawang Saketeng, Jerokuta, Baranangsiang dan Leuwi Sipatahunan. Pakuan diyakini sebagai Ibukota Pajajaran terletak di Kota Bogor. Pakuan dikenal sebagai pusat Pemerintahan Pajajaran pada pemerintahan Prabu Siliwangi (Sri Baduga Maharaja) yang penobatannya tepat pada tanggal 3 Juni 1482, yang selanjutnya ditetapkan oleh DPRD Kabupaten dan Kota Bogor di tahun 1973 sebagai hari jadi Bogor.

Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Bogor ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Bogor juga termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Jabodetabekpunjur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Dalam konteks regional, Kota Bogor merupakan kota penyangga ibukota yang diarahkan untuk menampung 1,5 juta jiwa penduduk pada tahun 2025 dalam rangka mengurangi tekanan kependudukan di Jabodetabek. Dalam konteks internasional, Kota Bogor merupakan salah satu cagar budaya dengan adanya Kebun Raya Bogor yang menjadi daya tarik wisatawan asing dan domestic<sup>1</sup>

*Smart City* merupakan konsep yang diusung oleh pemerintah Kota Bogor sejak tahun 2017 dan merupakan kota pertama yang mengikuti program 100 *Smart City* di Indonesia<sup>2</sup>. Melalui pembangunan *Smart City*, Kota Bogor menguatkan tiga identitasnya sebagai *Bogor Green City*, *Heritage City* dan *Smart City*.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Untuk membangun *Smart City* diperlukan usaha dan waktu yang panjang. Komitmen dan perencanaan yang matang perlu dilakukan secara menyeluruh, semua pihak di tingkat daerah maupun pusat, warga baik secara individu maupun komunitas, pemerintah, dan sektor swasta harus melibatkan diri dan berperan aktif.

Dokumen 1 ini berisi Analisis Strategis *Smart City* Kota Bogor, dengan maksud untuk menjadi dasar penyusunan Rencana Induk *Smart City* Kota Bogor dan Rencana *Quick Wins Smart City* Kota Bogor yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) dan perkembangan eksternal yang sedang berlangsung.

---

<sup>1</sup> perkotaan.bpiw.pu.go.id (2022). diakses: <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/19>

<sup>2</sup> Susianti, Dede (2021).” Dinilai Jenuh, Bima Arya Evaluasi 'Smart City' Kota Bogor. diakses: <https://mediaindonesia.com/nusantara/409906/dinilai-jenuh-bima-arya-evaluasi-smart-citykota-bogor>

Tujuan disusunnya Dokumen 1 ini adalah untuk menyediakan:

- a. Analisis Masa Depan (*Outlook Analysis*) berupa analisis visi dan harapan pembangunan daerah ke depan serta analisis kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah;
- b. Analisis Kesiapan Smart City (*Smart City Readiness*) baik dari sisi *nature* (alam), struktur (sumber daya), infrastruktur, suprastruktur (kebijakan dan kelembagaan), serta *culture* (sosial budaya);
- c. Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) antara visi masa depan dengan kondisi saat ini;
- d. Analisis Strategi Pembangunan *Smart City* dengan memperhatikan *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (kesempatan) dan *Threats* (ancaman);
- e. Analisis Visi Pembangunan *Smart City*.

Semua analisis yang dilakukan untuk memberikan gambaran langsung mengenai analisis strategis *Smart City* daerah Kota Bogor.

## 2. ANALISIS MASA DEPAN

---

### 2.1. Analisis Visi Pembangunan Daerah

Visi merupakan tujuan dan arah utama yang akan diwujudkan melalui misi yang merupakan proses dan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi, dalam proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan di akhir periode perencanaan pembangunan daerah. *Smart City* harus memiliki visi dan misi yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah hal ini perlu diperhatikan untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Apabila program *Smart City* belum termasuk dalam RPJD dan RPJMD, maka daerah perlu segera menyesuaikan.

#### 2.1.1. Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD

Visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan menjadi dasar untuk merumuskan prioritas pembangunan Kota Bogor tahun 2019-2024<sup>3</sup>. Visi Kota Bogor 2019-2024 adalah:

**”Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”**

Visi tersebut memiliki sudut pandang dari beberapa ruang lingkup, yaitu;

1. **Kota Bogor**, yang meliputi seluruh wilayah dan isinya, Kota Bogor dan seluruh warga yang ada dalam batas-batas yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Kota Bogor.
2. **Kota yang Ramah Keluarga**, memiliki arti kondisi Ramah Keluarga yang dipenuhi dari:

---

<sup>3</sup> Dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024 Kota Bogor

- a. Derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, pendidikan, sosial masyarakat serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
- b. Kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- c. Pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Untuk mencapai visi, Kota Bogor merumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visinya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Kota Bogor memiliki 3 (tiga) Misi yaitu:

### **1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat**

Kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

### **2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**

Kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota. Kota Cerdas (*Smart City*) dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahannya (*understanding*), dan mengatur/mengambil tindakan (*acting*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota.

Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

### 3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kondisi kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera. Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah

*Smart City* menghubungkan manusia, sosial, dan infrastruktur TIK untuk mengatasi masalah publik, mencapai pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup warganya. *Smart City* menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan hidup, kemampuan kerja, dan keberlanjutannya<sup>4</sup>. *Smart City* adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, meliputi sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan<sup>5</sup>.

Visi pembangunan Kota Bogor adalah "Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga" visi tersebut memiliki unsur orientasi masa depan, bahwa Kota Bogor di masa yang akan datang menjadi kota yang ramah keluarga. Memiliki unsur wujud kreativitas di mana visi memuat cita-cita untuk mencapai kota yang ramah keluarga dan pencapaian dilakukan melalui beberapa upaya yang dijabarkan dalam misi. Visi memiliki nilai yang mengandung penghargaan kepada masyarakat, yaitu mewujudkan masyarakat yang ramah keluarga.

---

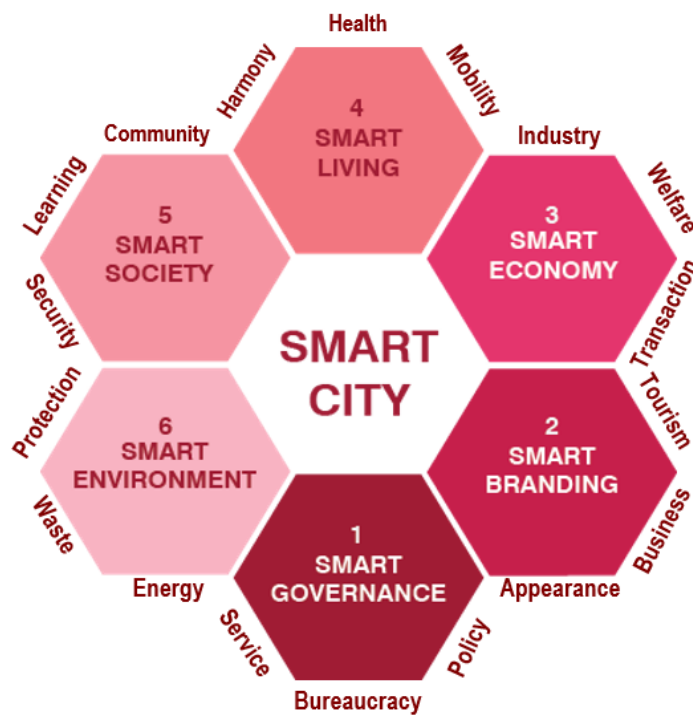
<sup>4</sup> [www.smartcitiescouncil.com](http://www.smartcitiescouncil.com), 2014

<sup>5</sup> Joga, N. (2017). Mewariskan Kota Layak Huni. Gramedia Pustaka Utama.

Visi pembangunan Kota Bogor telah sejalan dengan prinsip *Smart City* melalui perwujudan Kota Ramah Keluarga yang mencerminkan adanya hubungan manusia, sosial, pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup warga.

### 2.1.2. Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dimensi *Smart City*

Dalam kerangka pikir *Smart City* terdapat 6 (enam) dimensi yang memiliki peran yang sama penting, terintegrasi dan memperkuat semua dimensi.



Gambar 2.1 Dimensi Smart City

Sumber: Citiasia Inc, 2016

Keenam dimensi tersebut adalah:

1. *Smart Governance*: gambaran tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam

birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

2. *Smart Branding*, yaitu inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. *Smart Branding* didasarkan pada pemikiran bahwa sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya.
3. *Smart Economy*, dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Oleh karena itu terdapat tiga elemen dalam *Smart Economy*, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan. Modal sosial seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kejahatan.
4. *Smart Living* menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kehidupan yang cerdas menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalam suatu kota. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
5. *Smart Society*, merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota, dimana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif dengan mediasi teknologi. Ada tiga elemen di dalam *Smart Society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).



6. *Smart Environment*, yang menunjukkan adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Elemen utama pada dimensi ini adalah perlindungan air, udara dan tanah, pengelolaan energi, serta sampah. *Smart Environment* berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik. Menurut undang-undang tentang penataan ruang, mensyaratkan 30% lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau baik privat maupun publik. Lingkungan yang bersih tertata merupakan contoh dari penerapan lingkungan yang pintar. Sasaran dari *Smart Environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan

Tabel 2. 1 Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dimensi Smart City

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Dimensi Smart City					
				Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
1	<b>Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat</b>	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas, yang dapat diukur dari Indeks Kesehatan dan Indeks kualitas Lingkungan Hidup.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat						
			Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman						
			Terkendalinya Sumber-sumber Pencemar Lingkungan dan / atau Kerusakan Lingkungan						
			Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan						
2	<b>Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas</b>	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter ( <i>Smart People</i> ), yang dapat diukur dari Indeks Pendidikan, Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Inovasi Daerah, Kategori Inovasi Daerah dan Indeks Pembangunan Gender (IDG)	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non-Formal ( <i>Smart People</i> )						
			Meningkatnya Kualitas Generasi Muda ( <i>Smart People</i> )						
			Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat						
			Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan, Toleransi dan Ketentraman Ketertiban						

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Dimensi Smart City						
				Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment	
		Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani ( <i>Smart Government</i> ), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi dan level Kematangan Smart City.	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	✓						
			Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi ( <i>Smart City</i> )	✓	✓	✓	✓			
3	<b>Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera</b>	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari Indeks Gini Rasio/Indeks ketimpangan dan Indeks Kebahagiaan	Menurunnya Tingkat Pengangguran			✓		✓		
			Menurunnya Tingkat Kemiskinan			✓		✓		
			Meningkatnya Ketahanan Keluarga					✓		
		Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah, yang dapat diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi dan capaian nilai Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi			✓				
			Meningkatnya Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi			✓		✓	✓	
			Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi		✓			✓		
				3	3	5	4	9	4	

3 misi, 5 Tujuan, 17 Sasaran

Sumber: Perubahan RPJMD 2019 -2024

### 2.1.3. Analisis Perilaku, Harapan Masyarakat dan *Stakeholder* Daerah

*Tabel 2. 2 Harapan Masyarakat*

Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan dan lingkungan di Kota Bogor memiliki banyak potensi dijadikan lokasi wisata, namun penataannya belum maksimal dan taman-taman masih minim bunga</li> <li>• Banyak Jalan rusak karena PDAM bocor, atau disebabkan oleh bekas pemasangan pipa-pipa</li> <li>• Banjir masih banyak terjadi diantaranya disebabkan bak kontrol yang mampet, perlu penanganan lebih serius</li> </ul>
Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih ada kegiatan perjudian/togel di wilayah pasar kebon kembang</li> <li>• Masih banyak kegiatan sabung ayam yang mengganggu kenyamanan warga.</li> </ul>
Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya penciptaan lapangan kerja bagi pemuda-pemuda di Kota Bogor. Agar tidak ada kejadian pemuda menganggur membuat kegaduhan di lingkungan sekitar.</li> <li>• Perlunya lokalisasi dan penataan UMKM disekitar pusat-pusat wisata, agar masyarakat dapat berjualan. Penataan UMKM diperlukan agar tidak berjualan di trotoar yang merupakan hak berjalan bagi warga</li> </ul>
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya curah hujan bogor menyebabkan beberapa bencana tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan sebagainya sehingga perlu ditangani dengan cepat.</li> <li>• Beberapa wilayah di kota Bogor tidak memiliki tempat pembuangan sampah umum</li> <li>• Layanan truk sampah tidak datang sesuai jadwal</li> <li>• Tidak adanya petugas dan armada pengangkut sampah membuat masyarakat yang ada di pinggir kali terpaksa membuang sampahnya di kali.</li> <li>• Banyak tempat pembuangan sampah liar</li> </ul>

Sumber: Sibadra 2022

### 2.1.4. Analisis Daya Saing Daerah

Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menyikapi persaingan global yang semakin ketat saat ini, daya saing daerah sangat menentukan posisi tawar daerah tersebut. Oleh karena itu, agar tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi, maka semakin tinggi pulalah seharusnya tingkat daya saing suatu daerah.

Badan Riset dan Inovasi Nasional telah membuat Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dapat digunakan untuk membandingkan dan menganalisis daya saing provinsi dan kabupaten/kota dengan daerah lain. IDSD dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan tingkat produktivitas, kemajuan, kemandirian, dan kemampuan dalam persaingan baik Domestik maupun Internasional.

Berdasarkan aspek penilaian daya saing daerah yang dikelompokkan berdasarkan 4 aspek utama yang dapat dibagi lagi menjadi 12 pilar<sup>6</sup>, yaitu:

1. Aspek Ekosistem Inovasi, terdiri atas Pilar Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi, dan Kesiapan Teknologi
2. Aspek Penguat (*Enabling Environment*), terdiri atas Pilar Kelembagaan, Infrastruktur, dan Perekonomian Daerah
3. Aspek Pasar (*Market*): terdiri atas Pilar Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, dan Ukuran Pasar
4. Aspek Sumber Daya Manusia (*Human Capital*): terdiri atas Pilar Kesehatan serta Pendidikan dan Keterampilan

Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai daya saing Kota Bogor, maka dalam analisis berikut, skor masing-masing pilar tahun 2021 dibandingkan dengan skor pilar yang sama dari kota dan kabupaten lain yang relevan. Pembanding yang dipilih adalah Kabupaten Bogor sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Bogor, serta Kota Depok, Kota Bekasi dan Kota Tangerang Selatan sebagai kota-kota di kawasan Jabodetabek yang menjadi penyangga/ penyokong DKI Jakarta.

Sementara di Provisinsi Jawa Barat, kemampuan daya saing Kota Bogor pada tahun 2021 berada di peringkat ke-6 atau naik dari kategori sedang menjadi tinggi dengan nilai indeks 3.066.

#### A. Aspek Ekosistem Inovasi

---

<sup>6</sup> Tim Sub Direktorat Sistem Informasi dan Desiminasi Inovasi Direktorat Sistem Inovasi, Deputi Bidang Penguatan Inovasi Kemenristek/BRIN (2021), Laporan Hasil Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2021

Perbandingan pilar-pilar Daya Saing dalam aspek Ekosistem Inovasi antara Kota Bogor dengan kabupaten/kota pembanding dapat dilihat pada Tabel 2.3.

*Tabel 2.3 Analisis Daya Saing dalam Aspek Ekosistem Inovasi*

	<b>Kota Bogor</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>Kota Tangerang Selatan</b>
<b>Pilar Dinamika Bisnis</b>	<b>2,50</b>	4,75	1,50	3,25	0,75
<b>Pilar Kapasitas Inovasi</b>	<b>2,94</b>	4,69	1,56	2,59	1,33
<b>Pilar Kesiapan Teknologi</b>	<b>4,50</b>	4,75	1,75	5,00	2,50
<b>Aspek Ekosistem Inovasi</b>	<b>3.32</b>	4,73	1,60	3,61	1,53

Pilar Dinamika Bisnis menggambarkan perluasan dan diversifikasi produksi barang dan jasa yang dapat berdampak pada perluasan lapangan kerja dan penciptaan rantai nilai tambah di suatu daerah. Kota Bogor memiliki nilai 2,50 atau di tingkat sedang, masih jauh dari tetangga terdekat Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Hal ini dapat bersumber dari prosedur dan regulasi perizinan, insentif pajak untuk industri tertentu dan/atau UMKM, serta dukungan-dukungan lain untuk meningkatkan kewirausahaan di kalangan masyarakat, yang masih dapat ditingkatkan.

Pilar Kapasitas Inovasi menggambarkan kemampuan daerah dalam inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya sehingga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Kota Bogor memiliki nilai 2,94 atau sudah tinggi. Salah satu faktor penentunya adalah jumlah inovasi daerah di tahun 2019-2020 yang mencapai 38 buah inovasi. Hasil pengukuran mandiri Indeks Inovasi Daerah 2021 adalah 57,80 atau ranking 138<sup>7</sup>. Walaupun demikian angka pada pilar Kapasitas Inovasi ini masih dapat ditingkatkan dengan melakukan kerjasama inovasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan,

<sup>7</sup> Litbang Kementerian Dalam Negeri. (n.d.). *Indeks Inovasi Daerah*. <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/data-indeks>

sehingga dapat meningkatkan jumlah paten dan Produk Unggulan Daerah yang dapat dikomersialisasi.

Pilar Kesiapan Teknologi menggambarkan apakah teknologi informasi telah berperan dalam peningkatan produktivitas, meningkatkan kapabilitas industri dan digitalisasi ekonomi daerah.. Kota Bogor sudah berada di tingkat sangat tinggi dengan angka 4,50.

**B. Aspek Penguat (*Enabling Environment*)**

Perbandingan pilar-pilar Daya Saing dalam aspek Penguat antara Kota Bogor dengan kabupaten/kota pembanding dapat dilihat pada Tabel 2.4.

*Tabel 2. 4 Analisis Daya Saing dalam Aspek Penguat*

	<b>Kota Bogor</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>Kota Tangerang Selatan</b>
<b>Pilar Kelembagaan</b>	<b>4,40</b>	4,50	2,90	4,30	3,70
<b>Pilar Infrastruktur</b>	<b>3,83</b>	2,42	3,25	3,50	1,25
<b>Pilar Perekonomian Daerah</b>	<b>2,30</b>	3,48	1,75	3,79	2,18
<b>Aspek Penguat</b>	<b>3,51</b>	3,47	2,63	3,86	2,38

Pilar Kelembagaan menggambarkan apakah stabilitas sosial politik, hukum dan keamanan telah memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah, mengingat tanpa adanya situasi keamanan yang kondusif dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka aktivitas perekonomian sulit untuk berkembang optimal. Kota Bogor memiliki nilai 4,40 atau hanya sedikit lebih kecil dibandingkan tetangga terdekat Kabupaten Bogor. Hal ini di antaranya disebabkan tata kelola pemerintahan di Kota Bogor yang sudah baik berdasarkan pengukuran indeks-indeks dari Kementerian PAN dan RB, juga penyelesaian pelanggaran peraturan yang berjalan dengan baik.

Pilar Infrastruktur menggambarkan bagaimana panjang dan kualitas jalan, akses terhadap air bersih, elektrifikasi dan lain-lain menunjang aktivitas ekonomi daerah, termasuk juga

menarik investor masuk ke daerah. Kota Bogor memiliki nilai 3,83 atau tertinggi di antara daerah pembanding.

Pilar Perekonomian Daerah adalah ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah, peningkatan kapasitas dan kemandirian fiskal, investasi, serta stabilitas ekonomi seperti angka kemiskinan dan inflasi. Kota Bogor memiliki nilai 2,30 cukup jauh dari Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor.

Perekonomian Kota Bogor sendiri mengalami pertumbuhan di tahun 2021 sebagaimana tergambar dari PDRB yang naik 5,19% dibandingkan 2020, sementara Pendapatan Asli Daerah naik 4,88%. Namun tingkat kemiskinan mengalami peningkatan dari 6,68% di tahun 2020 menjadi 7,24% di tahun 2021.

### C. Aspek Pasar (*Market*)

Perbandingan pilar-pilar Daya Saing dalam aspek Pasar antara Kota Bogor dengan kabupaten/kota pembanding dapat dilihat pada Tabel 2.5.

*Tabel 2.5 Analisis Daya Saing dalam Aspek Pasar*

	Kota Bogor	Kab. Bogor	Kota Depok	Kota Bekasi	Kota Tangerang Selatan
<b>Pilar Efisiensi Pasar Produk</b>	<b>2,58</b>	4,00	2,67	3,25	1,83
<b>Pilar Ketenagakerjaan</b>	<b>3,17</b>	3,67	2,17	4,17	0,33
<b>Pilar Akses Keuangan</b>	<b>0,50</b>	3,00	2,00	2,83	0,00
<b>Pilar Ukuran Pasar</b>	<b>3,00</b>	2,00	0,50	5,00	1,00
<b>Aspek Pasar</b>	<b>2,31</b>	3,17	1,83	3,81	0,79

Pilar Efisiensi Pasar Produk menunjukkan apakah kemitraan dan kerjasama antara pelaku usaha cukup kuat, apakah pajak dan retribusi daerah berkontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah, apakah telah dibuat regulasi untuk mengatur stabilitas pasar. Kota



Bogor memiliki nilai 2,58 jauh lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.

Pilar Ketenagakerjaan menggambarkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja untuk menunjang aktivitas ekonomi daerah, serta bagaimana peran pemerintah daerah untuk meningkatkannya. Kota Bogor memiliki nilai 3,17 atau tinggi, namun masih belum sebaik beberapa daerah pembanding. Angkatan kerja Kota Bogor adalah sebesar 529.003 orang yang berarti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2021 adalah sebesar 61,8%. Jumlah ini meningkat dari tahun 2020 yang sebanyak 514.323 orang atau TPAK 60,8%. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 12,7% di tahun 2020 menjadi 11,8% di tahun 2021.

Pilar Akses Keuangan adalah ketersediaan akses permodalan bagi dunia usaha baik dari lembaga perbankan maupun non-perbankan, serta pertumbuhan kredit yang tersedia untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Tingginya akses keuangan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah secara signifikan. Kota Bogor memiliki nilai 0,50, cukup jauh dari daerah-daerah pembanding, kecuali Kota Tangerang Selatan.

Pilar Ukuran Pasar menggambarkan peluang untuk berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat daerah, baik pasar internal yang digambarkan oleh persentase penduduk usia dewasa, maupun pasar eksternal melalui indikator pertumbuhan nilai ekspor. Kota Bogor memiliki nilai 3,00 yang tergolong tinggi, juga dibandingkan dengan daerah-daerah pembanding, kecuali Kota Bekasi. Di antara pembentuk nilai ini adalah jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang mencapai 75,9%.

D. Aspek Sumber Daya Manusia (*Human Capital*)

Perbandingan pilar-pilar Daya Saing dalam aspek Sumber Daya Manusia antara Kota Bogor dengan kabupaten/kota pembanding dapat dilihat pada Tabel 2.6.

*Tabel 2. 6 Analisis Daya Saing dalam Aspek Sumber Daya Manusia*

	<b>Kota Bogor</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>Kota Tangerang Selatan</b>
<b>Pilar Kesehatan</b>	<b>3,25</b>	3,38	3,63	3,75	1,75
<b>Pilar Pendidikan dan Keterampilan</b>	<b>3,00</b>	3,50	1,88	3,25	2,25
<b>Aspek Sumber Daya Manusia</b>	<b>3,13</b>	3,34	2,75	3,50	2,00

Pilar Kesehatan merepresentasikan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah, di mana pembangunan seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini ditunjukkan di antaranya oleh tingkat kematian bayi/balita, usia harapan hidup, dan ketersediaan layanan kesehatan. Kota Bogor memiliki nilai 3,25, sedikit di bawah Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi. Hal ini didukung di antara oleh Angka Harapan Hidup Kota Bogor di tahun 2021 yang cukup tinggi yaitu 73,82 tahun. Rasio dokter di Kota Bogor mencapai 150 dokter per 100.000 penduduk, jauh di atas standar WHO yaitu 40 dokter per 100.000 penduduk.

Pilar Pendidikan dan Keterampilan menggambarkan kompetensi angkatan kerja yang ditingkatkan dengan pendidikan dan pelatihan, sehingga menjadi tenaga kerja produktif yang berdampak positif bagi perekonomian daerah. Kota Bogor memiliki nilai 3,00 atau tinggi, walaupun belum setinggi beberapa daerah pembanding. Hal ini disebabkan diantaranya jumlah fasilitas pendidikan baik umum maupun vokasi yang memadai di Kota Bogor, mulai dari jenjang usia dini, pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi. Angka Partisipasi Murni di jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/SMK/ sederajat masing-masing sebesar 95,65; 75,65 dan 62,98.

Dengan demikian dari keempat aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap pembandingan Kabupaten Bogor sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Bogor, serta Kota Depok, Kota Bekasi dan Kota Tangerang Selatan sebagai kota-kota di kawasan Jabodetabek yang menjadi penyangga/ penyokong DKI Jakarta, daya saing Kota Bogor berada di posisi ketiga setelah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.

### 2.1.5. Analisis Kelembagaan dan Pemerintah Daerah yang Relevan dengan Kebutuhan Seluruh Stakeholder yang Ada

Kota Bogor memiliki 49 Perangkat Daerah yang terdiri dari<sup>8</sup>:

*Tabel 2. 7 Perangkat Daerah*

No	Perangkat Daerah	No	Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah	26	Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	27	Badan Perencanaan pembangunan daerah
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia
4	Asisten Administrasi umum	29	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	Sekretariat DPRD	30	Badan pendapatan daerah
6	Inspektorat Daerah	31	Badan kesatuan bangsa dan politik
7	Dinas Pendidikan	32	Kecamatan Bogor Tengah
8	Dinas Kesehatan	33	Kecamatan Bogor Selatan
9	Dinas Sosial	34	Kecamatan Bogor Barat
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	35	Kecamatan Bogor Utara
11	Dinas Lingkungan Hidup	36	Kecamatan Bogor Timur
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	37	Kecamatan Tanah Sereal
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	38	Kelurahan
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	39	Unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	40	Badang Penanggulangan Bencana daerah
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	41	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia

<sup>8</sup> Surat edaran No 061.1/113-org tentang singkatan nomenklatur perangkat daerah/unit Kerja

17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	42	Bagian Pemerintahan
18	Dinas Tenaga Kerja	43	Bagian Kesejahteraan Rakyat
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44	Bagian Perekonomian
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	45	Bagian Administrasi Pembangunan
21	Dinas Perhubungan	46	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
22	Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	47	Bagian Umum
23	Satuan Polisi pamong praja	48	Bagian Organisasi
24	Dinas Perumahan dan Permukiman	49	Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan
25	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		

## 2.2. Analisis Kondisi Eksternal

Strategi pengembangan suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kondisi eksternal. Berbagai tren atau perubahan seperti tren politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain dapat mempengaruhi kebijakan dan standar pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat atau *stakeholder* lainnya.

### 2.2.1. Analisis Tren dan Perkembangan Politik

#### A. Dukungan Politik terhadap *Smart City*

Lebih dari separuh dekade belakangan Pemerintah telah memberikan dukungan penuh pada pengembangan *Smart City*. Salah satu program awal *Smart City* di Indonesia adalah terselenggaranya kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Kemendagri, Kementerian PAN & RB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU & PR, Kantor Staf Presiden dalam bentuk "Gerakan Menuju 100 *Smart City*". Target program ini adalah sebanyak 100 kota/kabupaten di Indonesia telah melaksanakan pembangunan *Smart City* pada tahun 2019 dan menjadi *role model* bagi daerah lain di Indonesia. Pembangunan *Smart City* akan bergulir terus, tidak hanya terhenti di 100 kota dan kabupaten tersebut, namun juga akan meliputi seluruh kota/kabupaten di Indonesia.

Pada tahun 2017, “Gerakan Menuju 100 *Smart City*” memilih 25 kabupaten/kota untuk difasilitasi dan didampingi dalam menyusun *Rencana Induk Smart City* serta merencanakan dan melaksanakan program *Quick Win Smart City*, dimana Kota Bogor termasuk di dalamnya.

Dukungan terhadap pengembangan *Smart City* kembali muncul dari Presiden Republik Indonesia, sebagaimana disampaikan dalam sambutan pada acara HUT Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Sabtu, 17 April 2021<sup>9</sup>. "Mari kita jadikan kota-kota di Indonesia menjadi *Smart City* yang diawali dengan desain yang *smart*. Mari kita jadikan provinsi-provinsi di Indonesia menjadi *Smart Province*," kata Presiden sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

“Desainnya yang *smart*, *smart* secara kultural, *smart* secara sosial, dan *smart* secara ekonomi. Dan kemudian ditopang oleh teknologi termasuk automasi *Internet of Things* yang meningkatkan kebahagiaan warganya,” imbuhnya.

## B. Percepatan Transformasi Digital

Di samping dukungan terhadap *Smart City*, Presiden juga memberikan arahan untuk mempercepat transformasi digital sebagaimana disampaikan dalam Rapat Terbatas Perencanaan Transformasi Digital tanggal 3 Agustus 2020<sup>10</sup>. Arahan tersebut menyangkut lima aspek yaitu akses dan infrastruktur, digitalisasi layanan publik, integrasi pusat data nasional, pemenuhan kebutuhan SDM talenta digital, serta penyesuaian regulasi dan penyediaan pendanaan dalam berbagai skema,. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan *Smart City* di kota dan kabupaten seluruh Indonesia.

Sebagai implementasi dari amanat Presiden tersebut, maka Kementerian Kominfo menyusun Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang merupakan pedoman strategis untuk

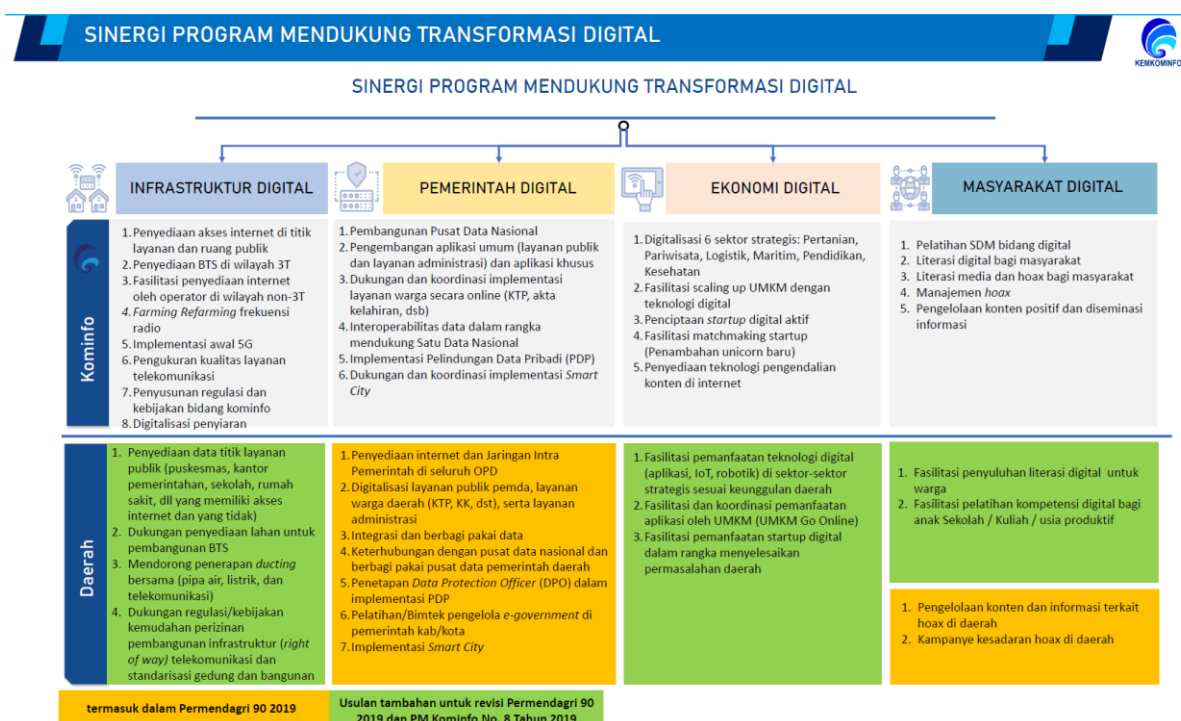
---

<sup>9</sup> Sekretariat Presiden Republik Indonesia. (2021). *Sambutan Presiden Jokowi pada acara HUT Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia*. YouTube Sekretariat Presiden. <https://www.youtube.com/watch?v=mUVTQC1HM8s>

<sup>10</sup> Sekretariat Presiden Republik Indonesia. (2020). *Presiden Jokowi Pimpin Ratas Perencanaan Transformasi Digital*. YouTube. [https://www.youtube.com/watch?v=s\\_XnrxG-WfQ](https://www.youtube.com/watch?v=s_XnrxG-WfQ)

memfasilitasi transformasi digital Indonesia pada empat sektor. Adapun keempat sektor itu yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.

Keberhasilan percepatan transformasi pada keempat sektor tersebut tentunya dapat dicapai apabila terdapat sinergi antara program-program Kementerian Kominfo dan pemerintah daerah. Sinergi ini tentunya harus tercermin pula dalam program-program Kota Bogor, sehingga percepatan transformasi digital dapat segera terwujud sebagaimana arahan Presiden. Untuk itu Biro Perencanaan Kementerian Kominfo telah menyusun usulan sinergi program sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 2 Sinergi Program Mendukung Transformasi Digital<sup>11</sup>

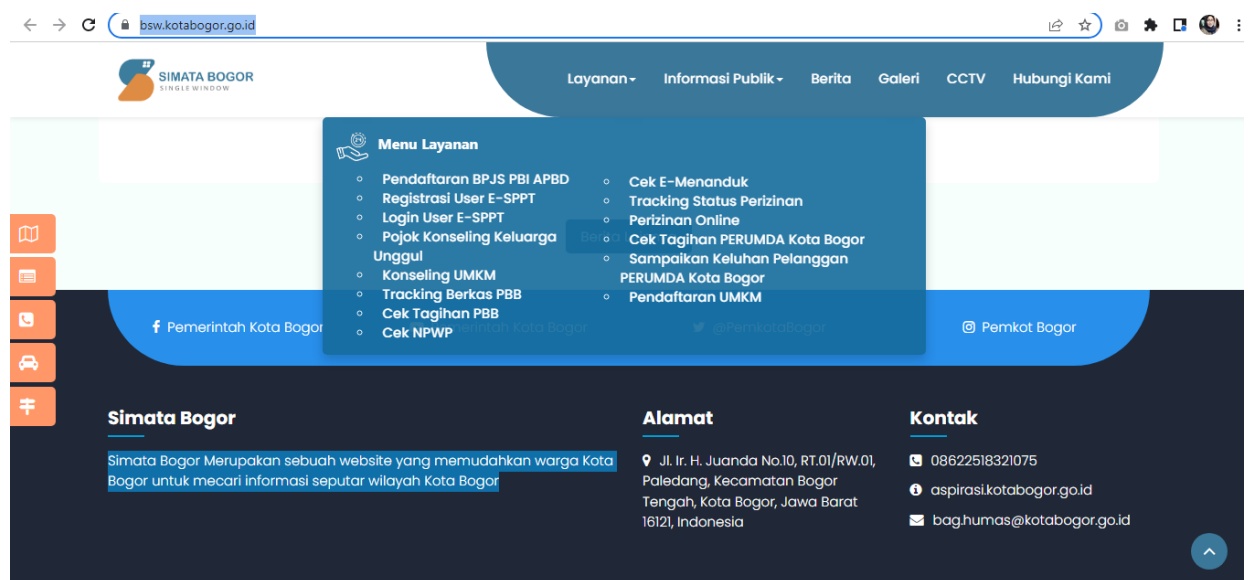
### C. Transparansi dalam Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara

<sup>11</sup> Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). *Kesesuaian NSPK Program/Kegiatan Pemerintah Pusat Dan Daerah*.

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Keterbukaan informasi dalam pelayanan publik merupakan salah satu ciri negara demokratis yang mendukung pelaksanaan *good governance*, sekaligus dapat mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Memanfaatkan teknologi terkini, Pemerintah Kota Bogor menyediakan situs Simata Bogor <http://bsw.kotabogor.go.id> memudahkan warga Kota Bogor untuk mencari informasi seputar wilayah Kota Bogor. Informasi yang tersedia juga berupa tracking atau pelacakan status pelayanan publik yang sedang berjalan seperti permohonan perizinan, pajak daerah serta dokumen kependudukan.



Gambar 2.3 Tampilan situs Simata

Sementara informasi lainnya terkait pemerintah daerah seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Pelaksanaan APBD, dan lain-lain harus tersedia dalam versi terkini melalui situs web pemerintah daerah.

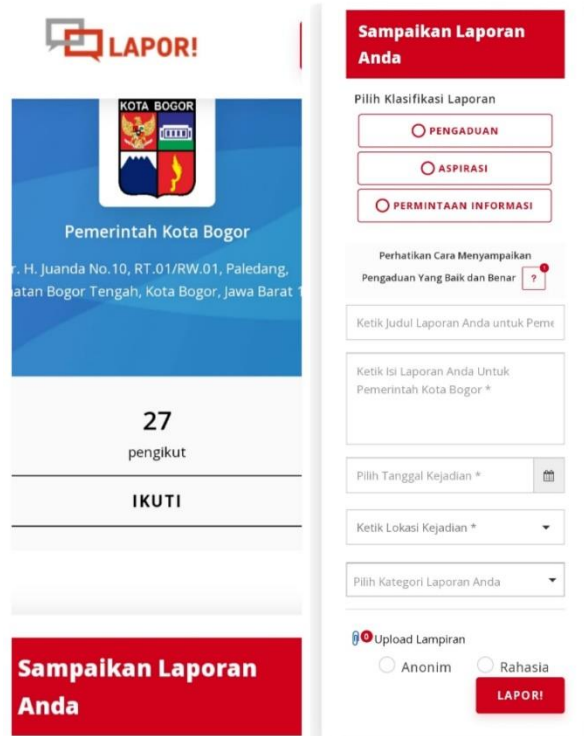
#### D. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pemerintah sebagai pemangku amanah rakyat sudah sewajarnya memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, baik berupa kritik, saran, ataupun keluhan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, seperti rencana tata ruang, pajak dan retribusi daerah, rencana dan anggaran pembangunan daerah, perizinan, serta aturan-aturan yang memberikan sanksi atau berdampak sosial.

Tren yang berkembang adalah pemanfaatan teknologi secara maksimal untuk memudahkan penyampaian aspirasi masyarakat kapanpun dan dimanapun. Aspirasi ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan, perbaikan sarana dan prasarana, penanganan keamanan dan ketertiban, dan sebagainya. Sarana atau kanal penyampaian aspirasi ini dapat berupa hotline SMS, WhatsApp atau Telegram, media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, e-mail, maupun aplikasi. Kanal yang baik harus memiliki metode pendistribusian informasi secara otomatis, dapat menyajikan informasi secara *real time*, serta dapat diolah menjadi data untuk disajikan dalam bentuk *dashboard* dan laporan sehingga membantu pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia membangun Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR!), yaitu layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu situs web [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), SMS 1708, Twitter @lapor1708 serta aplikasi *mobile* (Android dan iOS).





Gambar 2. 4 Tampilan situs web LAPOR! Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor sendiri telah memiliki Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SiBadra) yang dapat diakses melalui situs web <http://sibadra.kotabogor.go.id> dan aplikasi *mobile* (Android dan iOS). Tampilan SiBadra versi web dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 5 Tampilan situs web SiBadra

## 2.2.2. Analisis Tren dan Perkembangan Ekonomi

### A. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tren pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin menguat, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan pergerakan inflasi yang menguat sepanjang triwulan I tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2022 mencapai 5,01% (y-o-y), tidak jauh berbeda dari triwulan IV tahun 2021 yaitu 5,02% (y-o-y). Kinerja positif tersebut di antaranya didorong oleh peningkatan permintaan domestik khususnya konsumsi rumah tangga, seiring pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat dan percepatan vaksinasi COVID-19. Sementara secara global, konflik Rusia-Ukraina berdampak kenaikan harga komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional sehingga meningkatkan nilai ekspor.



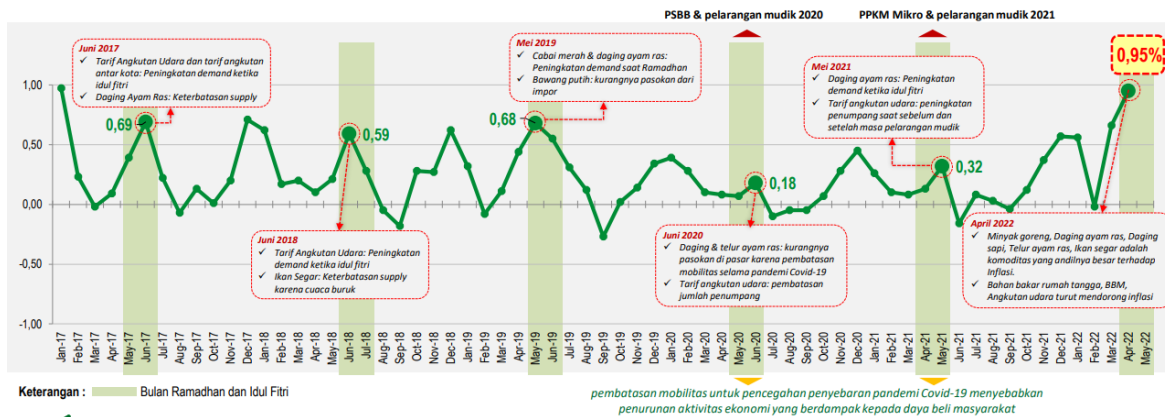
Gambar 2. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (year-on-year) 2019-2022<sup>12</sup>

Kondisi ketenagakerjaan belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi Covid-19, karena jumlah penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19 masih cukup besar. Walaupun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia mengalami penurunan dari 6,26% di bulan Februari 2021 menjadi 5,83% di bulan Februari 2022. TPT provinsi Jawa Barat sendiri menurun dari 8,92% menjadi 8,35%. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2022 menunjukkan pertumbuhan positif terutama

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik. (2022, May 9). Berita Resmi Statistik.. [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20220509115801.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20220509115801.pdf)

Transportasi dan Perdagangan, Industri Pengolahan, serta Perdagangan Besar dan Eceran. LU yang mengalami penurunan pada triwulan I 2022 adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,54%.

Inflasi pada triwulan I tahun 2022 mengalami peningkatan karena pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan harga komoditas yang lebih tinggi, namun masih terkendali dan berada dalam rentang target Bank Indonesia



Gambar 2. 7 Perkembangan Inflasi Umum (month-to-month) 2017-2022<sup>13</sup>

Untuk keseluruhan tahun 2022 Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4,5-5,3%. Hal ini ditopang oleh perbaikan ekonomi domestik yang diperkirakan tetap berlangsung seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Walaupun demikian perbaikan kinerja ekonomi akan dipengaruhi oleh volume ekspor yang tertahan dan gangguan rantai pasokan seiring dengan lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan dunia akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju, termasuk Amerika Serikat, mendorong terbatasnya prospek aliran modal asing.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik. (2022, May 9). Berita Resmi Statistik.. [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20220509115801.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20220509115801.pdf)

<sup>14</sup> Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. (2022, April 20). Laporan Kebijakan Moneter - Triwulan I 2022. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-I-2022.aspx>

## B. Perkembangan *E-Commerce* sebagai Bentuk Utama Ekonomi Digital

Ekonomi digital dalam arti umum adalah kegiatan ekonomi dengan menggunakan teknologi digital dan komputasi dengan internet sebagai infrastruktur dasarnya. *Electronic commerce* atau *e-commerce* merupakan penopang utama ekonomi digital di Indonesia. Berdasarkan *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) 2009 sebagaimana dikutip BPS<sup>15</sup>, *e-commerce* adalah jual beli barang atau jasa, yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan metode yang secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pesanan. Walaupun barang/jasa dipesan dengan metode tersebut, namun pembayaran dan pengiriman barang/jasa tidak harus dilakukan secara *online*.

Laporan E-economy SEA 2021 yang dikeluarkan oleh Temasek, Google, serta Bain & Company<sup>16</sup> menyebutkan perdagangan *e-commerce* di Indonesia pada 2021 tercatat US\$70 miliar atau meningkat 52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menjadikannya sebagai kontributor terbesar dalam pertumbuhan nilai ekonomi digital Indonesia.

Walaupun demikian, peningkatan nilai perdagangan *e-commerce* belum diikuti peningkatan jumlah *merchant* secara signifikan. Hasil survei *E-Commerce* 2021 yang diselenggarakan BPS menunjukkan bahwa dari seluruh usaha yang dilakukan pendataan, sampai dengan 30 Juni 2021 tercatat hanya 25,92 % yang melakukan kegiatan *e-commerce* atau hanya naik 0,67% dari enam bulan sebelumnya. Fenomena menarik yang dapat dilihat adalah 50,71% usaha yang didirikan lima tahun terakhir langsung melakukan kegiatan *e-commerce* sejak baru mulai beroperasi.

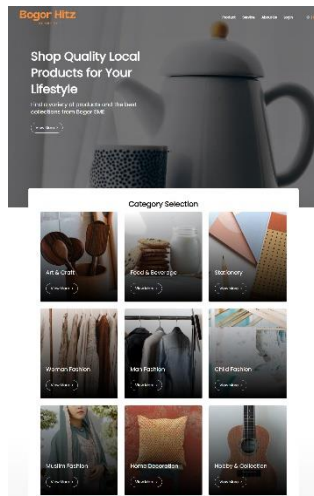
Selanjutnya, hasil survei tersebut menyatakan bahwa lebih dari separuh (54,66%) usaha *e-commerce* berjualan online melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Selanjutnya, hanya 21,64% usaha yang memiliki akun penjualan di *marketplace/ platform* digital. Peningkatan penggunaan *marketplace* perlu ditingkatkan mengingat dari hasil survei yang dilakukan MORE bersama Bappeda Kota Bogor, sekitar

---

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik E-Commerce 2021.

<sup>16</sup> Google, Temasek, Bain & Company. (2021). e-Conomy SEA 2021 “Roaring 20s: The SEA Digital Decade”.

81,2% dari 27.377 UMKM di Kota Bogor mengalami penurunan pendapatan selama pandemi.



Tampilan platform  
Bogor Hitz

Gambar 2. 8

Sedangkan hasil studi dari Asosiasi *Business Development Services* Indonesia (ABDSI) yakni asosiasi yang bergerak dalam pembinaan UMKM di Indonesia bekerja sama dengan LPM UI menyimpulkan sekitar 40 persen UMKM di Kota Bogor belum memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan produknya<sup>17</sup>. Hal ini direspon dengan baik oleh Pemerintah Kota Bogor dengan meluncurkan *platform* pasar digital Bogor Hitz (<http://www.bogorhitz.com>), yang merupakan *marketplace* hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Bogor dengan pihak swasta<sup>18</sup>.

### C. Keuangan Digital.

Upaya digitalisasi UMKM untuk meningkatkan daya saing harus dilakukan di berbagai aspek, tidak hanya memperluas akses pemasaran melalui *e-commerce (onboarding)*, namun juga meningkatkan literasi keuangan digital para pelaku UMKM serta meningkatkan inklusi keuangan terutama pembayaran digital dan akses perbankan.

Hal ini didukung oleh hasil survei *E-Commerce 2021*, dimana 78,72% usaha *e-commerce* masih mengutamakan penggunaan *Cash on Delivery (COD)*. COD dilakukan dengan membayar pesanan secara tunai di lokasi pembelian menggunakan uang tunai (*cash*) atau membayar pada saat pesanan tiba di tempat tujuan. Metode pembayaran yang paling sering digunakan berikutnya adalah transfer bank, baik melalui ATM, *internet banking*, maupun *mobile banking*, yaitu sebesar 16,33%.

<sup>17</sup> ANTARA News Agency. (2021, August 25). *UMKM Kota Bogor sudah saatnya "go digital"*. ANTARA News Jawa Barat. <https://jabar.antaranews.com/berita/305094/umkm-kota-bogor-sudah-saatnya-go-digital>

<sup>18</sup> ANTARA News Agency. (2021, August 20). *UMKM Kota Bogor pasarkan produk secara online melalui bogorhitz*. ANTARA News Megapolitan. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/152270/umkm-kota-bogor-pasarkan-produk-secara-online-melalui-bogorhitz>

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Sebagaimana dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, indeks inklusi keuangan di Indonesia di 2021 mencapai 83,6%, meningkat dari angka indeks 2020 sebesar 81,4%. Beberapa indikator utama yang mendukung pencapaian ini meliputi peningkatan akses keuangan, akselerasi penggunaan jasa keuangan formal, dan semakin membaiknya kualitas jasa keuangan. Tetapi di sisi lain, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan inklusi keuangan, yaitu 38,03% (OJK, 2019)<sup>19</sup>. Hal ini tentu menunjukkan tingginya risiko yang dimiliki oleh pengguna jasa keuangan.

Dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif disebutkan bahwa salah satu strategi utama inklusi keuangan adalah perluasan akses layanan keuangan formal dan digital, termasuk perbankan, industri keuangan non-bank, lembaga keuangan mikro, koperasi, dan sebagainya. Akses ini terutama diperlukan pada instrumen transaksi pembayaran, tabungan dan kredit atau pembiayaan.

Bank Indonesia telah mengimplementasikan visi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 melalui berbagai bentuk infrastruktur seperti QRIS (*Quick Response code Indonesia Standard*) yang saat ini telah digunakan oleh lebih dari 13 juta merchant di seluruh Indonesia sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019. QRIS kemudian diikuti oleh berbagai implementasi BSPI lainnya seperti QRIS Antarnegara, SNAP (Standar Nasional API Pembayaran) dan BI-FAST (Bank Indonesia Fast Banking).

Dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2022 Bank Indonesia, perkembangan transaksi nontunai dilaporkan cukup menggembirakan. Nilai transaksi uang elektronik pada triwulan I 2022 tercatat tumbuh 42,06% (yoy), dan untuk keseluruhan tahun 2022 diproyeksikan meningkat 18,03% (yoy) hingga mencapai Rp360 triliun. Nilai transaksi *digital banking* pada triwulan I 2022 meningkat 34,90% (yoy), dan untuk keseluruhan tahun 2022 diproyeksikan meningkat 26,72% (yoy)

---

<sup>19</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, May 20). Akselerasi Capaian Target Inklusi Keuangan dalam Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4140/akselerasi-capaian-target-inklusi-keuangan-dalam-pengembangan-kemandirian-ekonomi-pondok-pesantren>

Untuk mempermudah akses kepada layanan perbankan, terutama bagi nasabah mikro dan yang belum *bankable*, Otoritas Jasa Keuangan telah mencanangkan program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Sementara seiring dengan menurunnya persepsi risiko kredit pasca pandemi COVID-19, Pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat sebesar 14,98% (yoy) pada Maret 2022, khususnya bersumber dari kredit mikro dan kecil.

Wali kota Bogor telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah Melalui Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai salah satu bentuk implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Terkait hal ini, Bank Indonesia telah memberikan Penghargaan rangking 1 ETPD se-Jawa Barat yang telah mengimplementasikan elektronifikasi di sisi belanja sebesar 100%, penghargaan Apresiasi Jawara Ekonomi Digital Jawa Barat (AJEG JABAR) 2021 sebagai Kota terbaik pertama dalam implementasi ETPD, serta penghargaan terbaik ketiga dalam Digitalisasi Ekonomi Daerah<sup>20</sup>.

### 2.2.3. Analisis Tren dan Perkembangan Sosial

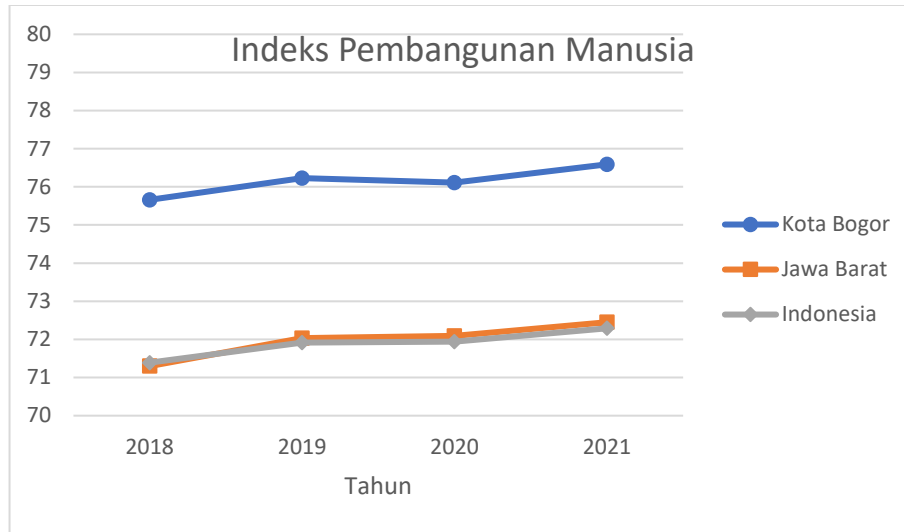
#### A. Pembangunan Manusia Indonesia

Tahun 1990 *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan konsep melalui laporan *Human Development Report* (HDR). Rekomendasi pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2014 pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Setelah masa pandemi COVID-19 yang berat dan membuat peningkatan IPM Indonesia melambat, pada tahun 2021 IPM Indonesia kembali meningkat sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

---

<sup>20</sup> Diskominfo Kota Bogor. (2021, September 28). *Kota Bogor Kejar Target Jadi Kota Terbaik Digitalisasi Ekonomi se-Indonesia*. Portal Resmi Pemerintah Kota Bogor. [https://kotabogor.go.id/index.php/show\\_post/detail/101055](https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/101055)

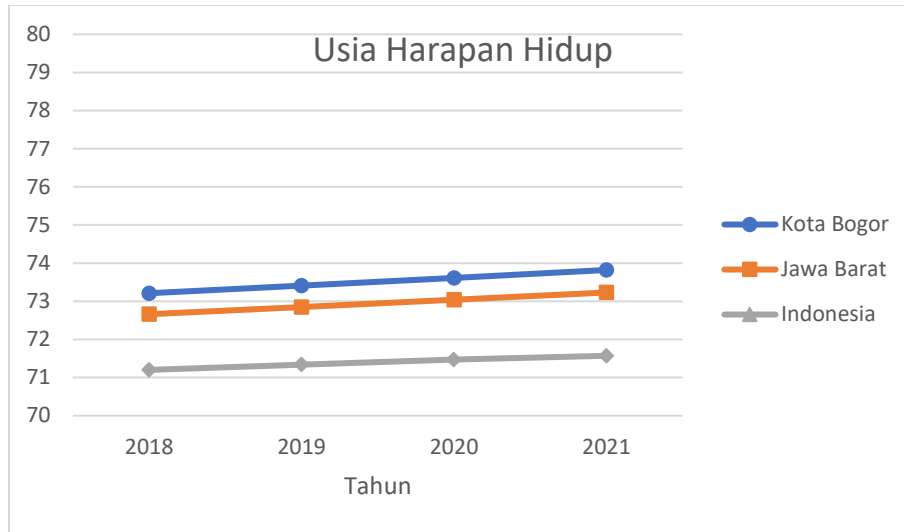


Gambar 2. 9 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Jawa Barat dan Kota Bogor<sup>21</sup>

Dimensi pertama IPM adalah dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang diwakili oleh Usia Harapan Hidup saat lahir. Jika bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang, maka secara tidak langsung mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut, Usia Harapan Hidup selama empat tahun terakhir meningkat secara konsisten.

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik. (n.d.). [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi. Retrieved June 10, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>





Gambar 2. 10 Usia Harapan Hidup Indonesia, Jawa Barat dan Kota Bogor<sup>22</sup>

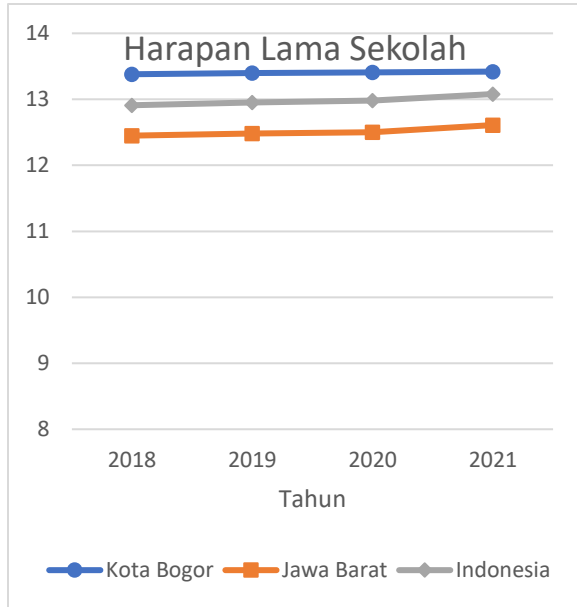
Dimensi pengetahuan dalam IPM diwakili oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS adalah perkiraan lamanya sekolah (dalam tahun) yang akan dijalani oleh anak usia 7 tahun, yaitu referensi umur pada program wajib belajar pemerintah. Sementara itu, RLS adalah rata-rata lamanya waktu yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dengan asumsi bahwa proses pendidikan seseorang sudah berakhir pada usia tersebut, sesuai standar internasional yang digunakan oleh UNDP. HLS merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek, sedangkan RLS menggambarkan indikator output pembangunan dalam jangka panjang.

Sebagaimana ditampilkan pada grafik-grafik berikut, secara nasional dan provinsi terjadi perlambatan peningkatan RLS pada masa pandemi COVID-19 dan mulai meningkat lebih cepat di Kota Bogor pada tahun 2021.<sup>23</sup>, percepatan pertumbuhan mulai terjadi di tahun 2021. Sementara HLS secara umum tumbuh lebih cepat di tahun 2021<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> Badan Pusat Statistik. (n.d.). [Metode Baru] Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH). Retrieved June 10, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/26/414/1/-metode-baru-umur-harapan-hidup-saat-lahir-uhh-.html>

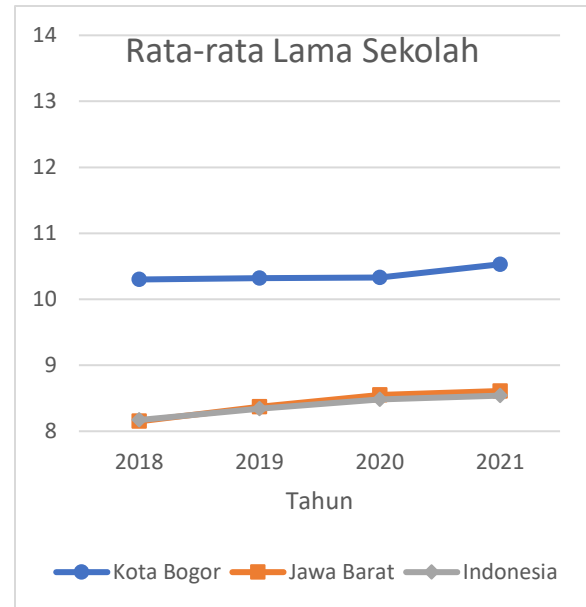
<sup>23</sup> Badan Pusat Statistik. (n.d.). [Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun). Retrieved June 10, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/26/415/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>

<sup>24</sup> Badan Pusat Statistik. (n.d.). [Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun). Retrieved June 10, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/26/417/1/-metode-baru-harapan-lama-sekolah.html>



*Harapan Lama Sekolah Indonesia, Jawa Barat dan Kota Bogor*

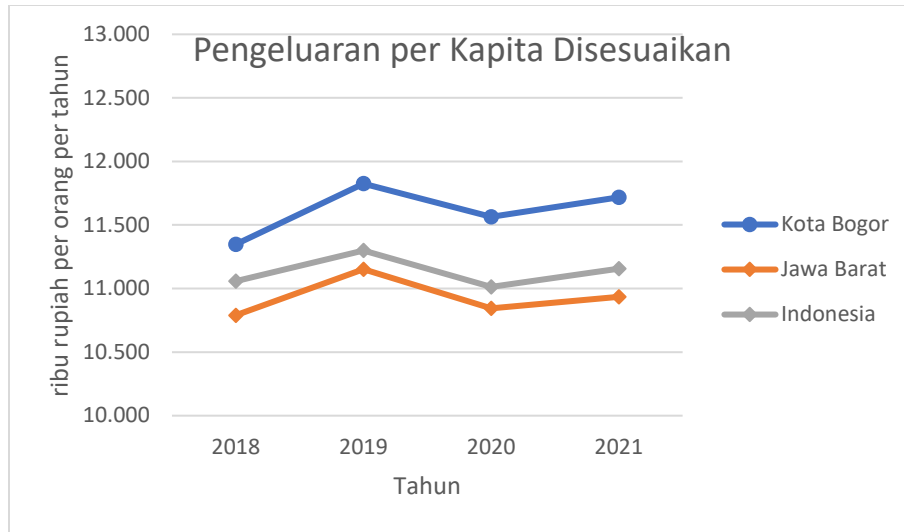
*Gambar 2. 12*



*Rata-rata Lama Sekolah Indonesia, Jawa Barat dan Kota Bogor*

*Gambar 2. 11*

Dimensi standar hidup layak dicerminkan oleh indikator pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Pada tahun 2020 indikator ini menurun baik di tingkat nasional, provinsi maupun kota. Bahkan di tingkat nasional, angka tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2021 kembali terdapat peningkatan walaupun belum mencapai angka pengeluaran di tahun 2019.



Gambar 2. 13 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan untuk Indonesia, Jawa Barat dan Kota Bogor

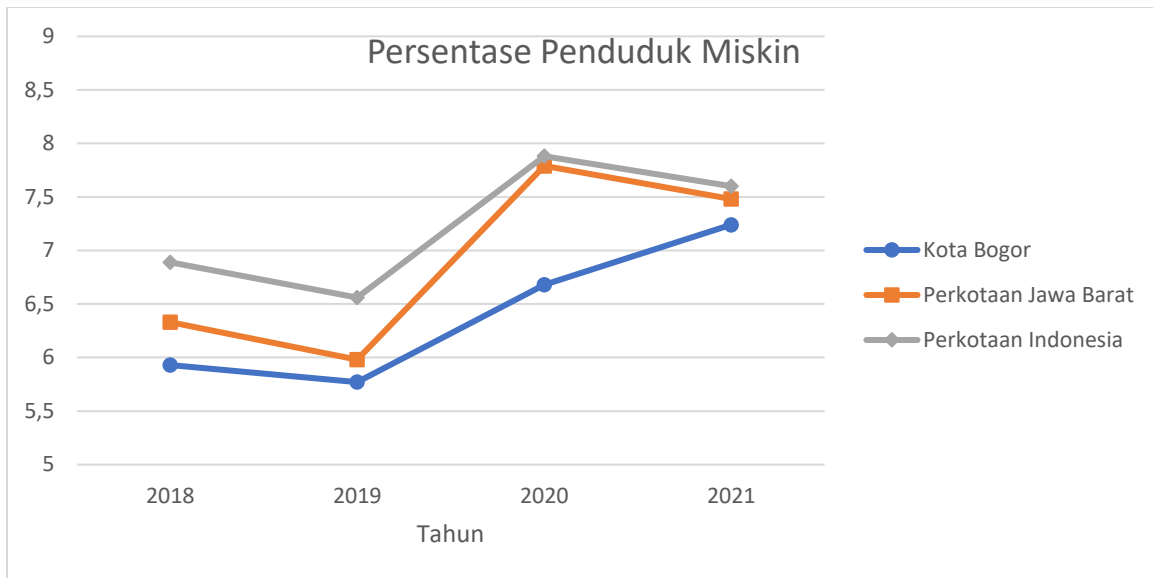
## B. Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Seseorang dikatakan penduduk miskin apabila pengeluarannya per bulan berada di bawah garis kemiskinan, yaitu nilai minimum tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup minimum makanan maupun kebutuhan hidup minimum non-makanan.

Selama dua tahun terakhir, pandemi COVID-19 telah berdampak pada kemiskinan di Indonesia. Secara umum persentase penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan di tahun 2020 akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya lapangan pekerjaan. Di tahun 2021 terjadi perbaikan di tingkat nasional dan provinsi Jawa Barat<sup>25</sup>, namun di Kota Bogor masih terjadi peningkatan persentase penduduk miskin<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah*. Retrieved June 10, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-provinsi-dan-daerah.html>

<sup>26</sup> BPS Kota Bogor. (2022). *Kota Bogor dalam Angka*.



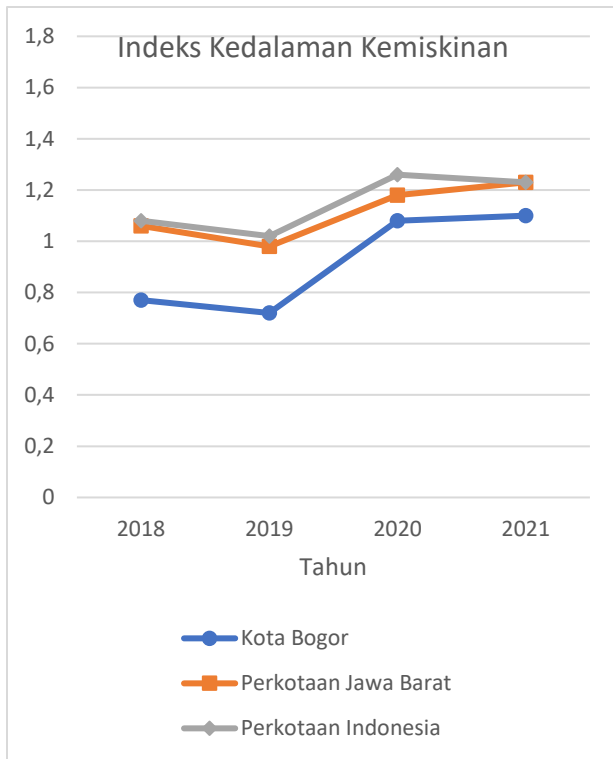
Gambar 2. 14 Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan Indonesia, Jawa Barat dan Kota Bogor

Untuk lebih menggambarkan kondisi kemiskinan di suatu daerah, selain tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin, juga digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index - P1*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Security Index – P2*). P1 merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. P2 merupakan dari kuadrat selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh jarak pengeluaran orang termiskin terhadap pengeluaran rata-rata penduduk miskin di wilayah tersebut.

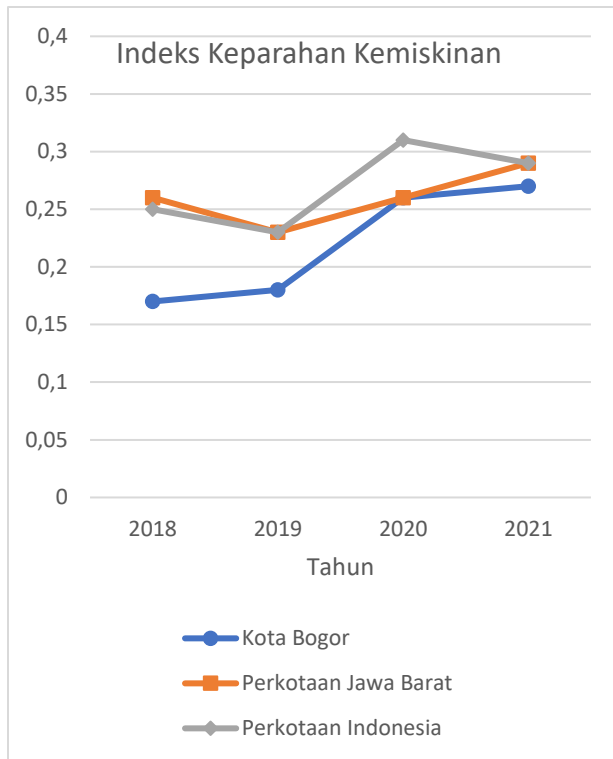
Perkembangan P1<sup>27</sup> dan P2<sup>28</sup> di wilayah perkotaan Indonesia, Jawa Barat dan Kota Bogor dapat dilihat pada kedua grafik berikut.

<sup>27</sup> Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi dan Daerah*. Retrieved June 10, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/23/503/2/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-menurut-provinsi-dan-daerah.html>

<sup>28</sup> Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi dan Daerah*. Retrieved June 10, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/23/504/2/indeks-kedalaman-kemiskinan-p2-menurut-provinsi-dan-daerah.html>



Gambar 2.16 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Perkotaan Indonesia, Perkotaan Jawa Barat dan Kota Bogor



Gambar 2.15 Indeks Keparahan Kemiskinan di Perkotaan Indonesia, Perkotaan Jawa Barat dan Kota Bogor

Terlihat dari kedua grafik di atas bahwa kedalaman dan keparahan kemiskinan di perkotaan Jawa Barat termasuk Kota Bogor belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi Covid-19.

Sementara itu dalam mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran digunakan rasio gini yang nilainya berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Berdasarkan data BPS, rasio gini perkotaan Indonesia bulan September 2021 adalah 0,398, lebih rendah dari Maret 2021 yang sebesar 0,401 dan September 2020 yang sebesar 0,299. Namun ketimpangan pengeluaran penduduk di perkotaan ini lebih buruk daripada pedesaan yang sebesar 0,314. Hal ini disebabkan sumber pendapatan di perkotaan lebih beragam dan memiliki rentang nilai yang sangat besar, sehingga rentang pengeluarannya pun lebih besar dibandingkan di pedesaan yang memiliki sumber pendapatan relatif sama yaitu pertanian.

Rasio gini perkotaan provinsi Jawa Barat bulan September 2021 masih lebih tinggi dari rata-rata perkotaan Indonesia yaitu sebesar 0,417<sup>29</sup>. Ini berarti masih terjadi kesenjangan kondisi sosial ekonomi yang cukup besar di kota-kota di Jawa Barat, termasuk di Kota Bogor.

### C. Literasi dan Kecakapan Digital

Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan penduduk Indonesia didominasi Generasi Z yaitu 27,94% dan millennial sebanyak 25,87%<sup>30</sup>. Mereka ini adalah para *digital natives*, yang dibesarkan atau menjadi dewasa di era teknologi digital. Pandemi COVID-19 yang berawal pada tahun 2020 pun telah menjadi salah satu pendorong utama digitalisasi layanan di Indonesia karena anjuran untuk menjaga jarak serta mengurangi mobilitas.

Survei Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia (APJII) tahun 2021 mengungkapkan bahwa lebih dari 47% responden laki-laki dan lebih dari 42% responden perempuan menghabiskan lebih dari 6 jam untuk penggunaan internet per harinya<sup>31</sup>. Hal ini berdampak pada pergeseran budaya masyarakat, dan untuk menghadapinya, literasi digital masyarakat harus ditingkatkan agar terampil, beretika dan mampu melindungi dirinya di ranah digital.

Keempat pilar yang menjadi pembentuk Indeks Literasi Digital yang diukur setiap tahun oleh Kementerian Kominfo. Tahun ini ada peningkatan indeks dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 3,46 ke 3,49. Pilar Budaya Digital (*digital culture*) tercatat dengan skor 3,90 dalam skala 5 atau baik. Selanjutnya pilar Etika Digital (*digital ethics*) dengan skor 3,53 dan Kecakapan Digital (*digital skill*) dengan skor 3,44. Sementara itu, pilar Keamanan Digital (*digital safety*) mendapat skor paling rendah (3,10) atau sedikit di atas sedang. Perbaikan terjadi pada pilar *Digital Culture* dan *Digital Skills*, tapi ada penurunan pada pilar *Digital Ethics* dan *Digital Safety*<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah*. Retrieved June 10, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>

<sup>30</sup> Antaranews.com. (2021, January 21). BPS: Penduduk Indonesia didominasi generasi Z Dan milenial. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/1960808/bps-penduduk-indonesia-didominasi-generasi-z-dan-milenial>

<sup>31</sup> APJII & SRA Consulting. (2022). *Profil Internet Indonesia 2022*.

<sup>32</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia & Katadata Insight Center. (2022). *Status Literasi Digital di Indonesia 2021*.

Hal yang masih banyak terjadi adalah bahwa masyarakat tidak menyadari bahaya dari mengunggah data pribadi. Namun di sisi lain, saat ini mengalami peningkatan kemampuan dalam mengklarifikasi berita bohong (hoax). Hasil survei juga menunjukkan perlunya upaya peningkatan literasi terhadap kelompok perempuan, kelompok berpendapatan rendah, yang berpendidikan rendah serta yang telah berumur

#### 2.2.4. Analisis Tren dan Perkembangan Teknologi

##### A. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, saat ini terdapat 2700 pusat data (*data center*) dan/atau ruang server pada 630 Instansi Pusat dan Daerah, dengan biaya operasional mencapai Rp. 8,1 triliun/tahun. Di pusat-pusat data ini terpasang lebih dari 27 ribu aplikasi dan puluhan ribu *database* dengan *platform* yang berbeda-beda serta tidak terintegrasi satu sama lain. Banyaknya *database* tersebut selain sangat tidak efisien, juga memiliki tingkat operabilitas dan tingkat keamanan yang rendah.

Penyediaan Pusat Data Nasional (PDN) akan mengkonsolidasi *database* yang tersebar di pusat data Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) itu menjadi beberapa *Super Database* Pemerintah Indonesia yang terstandarisasi dan terletak di beberapa lokasi saja. Database ini dibangun dalam Satu Data Indonesia, yang akan menyediakan data yang berkualitas untuk pengambilan keputusan. Saat ini telah ditetapkan empat lokasi pembangunan PDN yaitu di provinsi Kepulauan Riau, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur (Kawasan Ibu Kota Negara Baru), dimana PDN pertama di Bekasi ditargetkan sudah beroperasi pada akhir tahun 2023 mendatang<sup>33</sup>,

---

<sup>33</sup> Lufthi Anggraeni. (2021, December 31). *Kominfo Akan Bangun Pusat data Nasional Pertama tahun 2022*. medcom.id. <https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/ybDXqzAb-kominfo-akan-bangun-pusat-data-nasional-pertama-tahun-2022>

Melengkapi pengembangan PDN, akan dibangun pula *National Network Operation Center* dan Jaringan Intra Pemerintah (*Government Secure Network*)<sup>34</sup>. Tidak hanya untuk akses ke PDN, Jaringan Intra Pemerintah ini dapat menjamin keamanan dan kelancaran komunikasi antar K/L/D.

## B. *Internet of Things*

Salah satu perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk *Smart City* adalah *Internet of Things* (IoT), di mana perangkat atau obyek apapun dapat terkoneksi melalui internet, sehingga dapat mempertukarkan data, melakukan pengaturan dan sebagainya. IoT dianggap sebagai teknologi pendukung utama Industri 4.0, namun aplikasinya tidak terbatas pada industri manufaktur saja, melainkan mencakup pula sektor pertanian, perikanan, energi, dan sebagainya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk setiap dimensi *Smart City*.

Sebuah laporan dari institusi riset IoT Berg Insight mengatakan bahwa jumlah pelanggan IoT seluler di seluruh dunia meningkat 12% selama tahun 2020 menjadi 1,74 miliar. Pasar regional Eropa Barat dan Amerika Utara mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu di atas 15%. Di tahun 2025 diperkirakan akan ada 3,74 miliar perangkat IoT yang terhubung ke jaringan seluler di seluruh dunia<sup>35</sup>.

Untuk otomatisasi rumah dan bangunan, IoT dapat digunakan untuk pengendalian cahaya dan alat-alat rumah tangga, sistem keamanan seperti *surveillance*, deteksi kebakaran dan pencurian, serta hiburan. IoT juga dapat digunakan untuk pencatatan meter jarak jauh baik energi/listrik, air dan *utilities* lainnya, serta melakukan pengendalian perangkat. Meter listrik ini dapat memberikan informasi pada jaringan *Smart Grid* seperti yang sedang diuji coba di Amsterdam, dimana rumah tangga dapat menyimpan energi di unit penyimpanan energi rumah di luar *peak hours* dan menggunakannya pada *peak hours*. Panel surya di rumah-

---

<sup>34</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020, September 23). *Percepat Digitalisasi Layanan, Pemerintah Segera Konsolidasikan Pusat Data*. [https://kominfo.go.id/content/detail/29604/percepat-digitalisasi-layanan-pemerintah-segera-konsolidasikan-pusat-data/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/content/detail/29604/percepat-digitalisasi-layanan-pemerintah-segera-konsolidasikan-pusat-data/0/berita_satker)

<sup>35</sup> Berg Insight. (2021, July 30). *Berg insight says global cellular IoT connections grew 12 percent to reach 1.7 billion in 2020*. <https://www.berginsight.com/berg-insight-says-global-cellular-iot-connections-grew-12-percent-to-reach-17-billion-in-2020>



rumah terhubung ke jaringan *Smart Grid* kota dan memungkinkan penduduk menjual energi cadangan dari panel kembali ke jaringan.

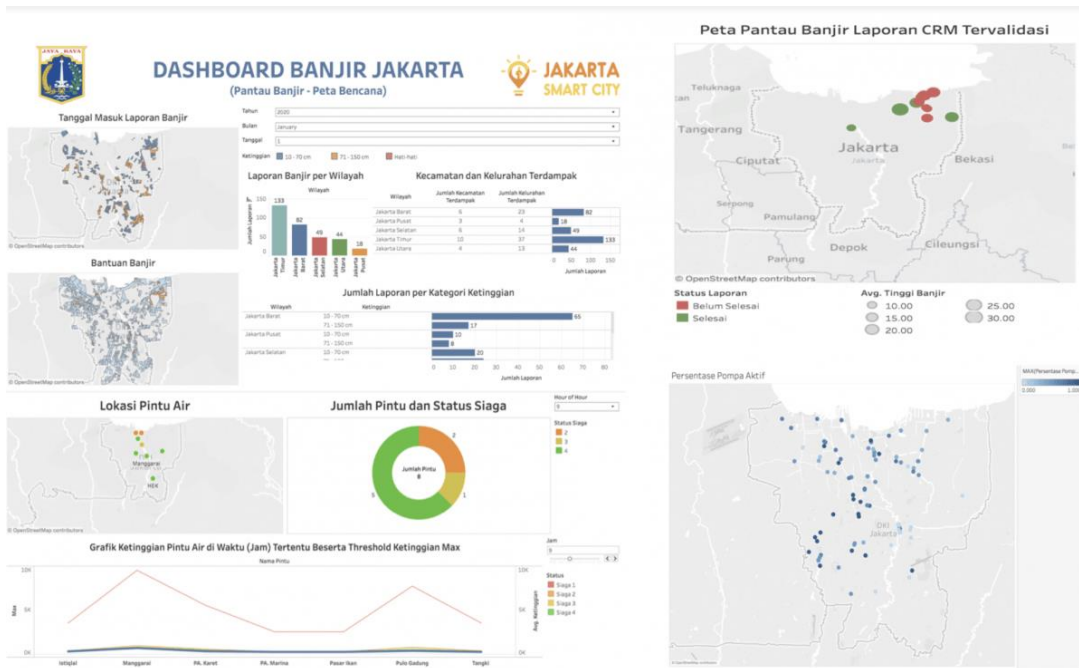
Pada sektor kesehatan, IoT dapat digunakan untuk melakukan monitoring kesehatan secara jarak jauh, notifikasi keadaan darurat, pengingat jadwal obat dan kontrol kesehatan, dan sebagainya.

Untuk pengelolaan transportasi cerdas, IoT dapat digunakan untuk pengendalian lalu lintas, pembayaran tol elektronik, kondisi darurat, sistem parkir cerdas (*Smart Parking*), dan lain-lain. Sementara untuk lingkungan hidup, IoT telah digunakan untuk monitoring cuaca, polusi, kebakaran, kondisi tanah, serta sistem peringatan dini untuk bencana alam.

### C. *Data Science dan Big Data untuk Smart City*

Saat ini data dalam jumlah besar dikeluarkan oleh dunia bisnis, media sosial, perangkat sensor, dan sebagainya. Data tersebut dapat berupa data terstruktur maupun dan tidak terstruktur (heterogen, merupakan gabungan dari teks, file, gambar, video, dll.), yang keseluruhannya disebut sebagai *big data*. *Data science* adalah bidang ilmu yang mempelajari data dan menghasilkan informasi seperti prediksi, rekomendasi, *insight*, model, atau sistem yang dapat digunakan untuk laporan, pengambilan keputusan, dan sebagainya.

Data yang dihasilkan oleh suatu kota/kabupaten dapat berupa data lalu lintas, sampah, pendidikan, kesehatan, bencana, pajak daerah, subsidi, aspirasi masyarakat, dan sebagainya. Dengan menggunakan *data science, big data* dari kota/kabupaten ini dapat digunakan untuk membuat *dashboard* dan rekomendasi kebijakan, laporan berkala, peringatan dini, dsb. Salah satu contoh *dashboard Smart City* dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 17 Dashboard Banjir Jakarta dari Jakarta Smart City<sup>36</sup>

Dashboard serupa dapat dikembangkan untuk berbagai kegunaan sesuai dengan kebutuhan daerah misalnya pemanfaatan lahan pertanian, perkebunan, pertambangan dan hutan lindung serta bencana alam.

#### D. Metaverse

Istilah *metaverse* pertama kali dikenal pada tahun 1992 novel fiksi ilmiah karya Neal Stephenson. Metaverse adalah realitas digital yang menggabungkan aspek media sosial, *game online*, *Augmented Reality (AR)*, *Virtual Reality (VR)*, dan *Cryptocurrency*. Metaverse ini memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan atau tur virtual, menonton konser atau pameran virtual dan mencoba barang secara virtual sebelum dibeli.

Salah satu kota yang sudah mengadopsi metaverse adalah kota Seoul dengan “Seoul Vision 2030”. Pada bulan Oktober 2021, *Seoul Municipal Government* (Pemerintah Kota Seoul) mengumumkan Rencana Induk Lima Tahun Pengembangan *Metaverse* Seoul yang berisi 20

<sup>36</sup> Tableau. (n.d.). *Jakarta smart city visualizes solutions to urban challenges*. <https://www.tableau.com/solutions/customer/jakarta-smart-city-visualizes-solutions-urban-challenges>

pekerjaan untuk tujuh bidang yaitu ekonomi, pendidikan, budaya dan pariwisata, komunikasi, pembangunan perkotaan, administrasi, dan infrastruktur, sesuai dengan tren dan perkembangan layanan *metaverse* di sektor publik dan swasta. SMG adalah pemerintah daerah pertama di Korea Selatan yang mengembangkan rencana kebijakan *metaverse* jangka menengah dan panjang yang komprehensif<sup>37</sup>.

Pada MIT *Future Compute Conference* sebagaimana dikutip VentureBeat<sup>38</sup>, biro kebijakan *Smart City* Seoul, Park Jong-Soo, mengungkapkan tiga tujuan utama proyek ini. Pertama, mereka ingin memudahkan warga untuk terhubung dengan layanan pemerintah dan satu sama lain. Selain itu mereka ingin mengatasi kendala waktu, ruang dan bahasa. Tujuan ketiga adalah untuk menemukan cara baru meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna.

Proyek ini akan menyediakan beberapa layanan. Portal layanan bisnis menyediakan tempat bagi *startup* untuk memamerkan ide dan layanan bisnis baru. Portal pendidikan menyatukan 34 kota kampus untuk melakukan *coaching*, kolaborasi, dan membangun jejaring. Layanan pariwisata virtual dengan *digital twin* memungkinkan pengunjung lokal dan internasional untuk menjelajahi atraksi terkini dan wisata sejarah seperti rekonstruksi Donuimun yang hancur saat perang bahkan festival besar seperti Seoul Lantern Festival. Proyek ini nantinya akan menyediakan ruang kerja bersama virtual untuk memungkinkan warga bekerja dari jarak jauh seolah-olah bekerja di kantor nyata.

## 2.2.5. Analisis Tren dan Perkembangan Lingkungan

### A. Pencemaran Air dan Udara

Polusi udara telah menjadi salah satu ancaman kesehatan lingkungan terbesar di dunia. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2019 menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang di dunia menghirup udara yang tercemar terutama karena aktivitas manusia yang

---

<sup>37</sup> Seoul Municipality Government. (2021, November 11). *Seoul, first local Gov't to start new-concept public service with "Metaverse platform"* -. <https://english.seoul.go.kr/seoul-first-local-govt-to-start-new-concept-public-service-with-metaverse-platform/>

<sup>38</sup> Lawton, G. (2022, May 5). How Seoul is creating a metaverse for a smarter city. VentureBeat. <https://venturebeat.com/2022/05/05/how-seoul-is-creating-a-metaverse-for-a-smarter-city/>

terkait dengan pembakaran bahan bakar fosil<sup>39</sup>. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melakukan penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) setiap tahun yang didasarkan pada parameter pencemar NO<sub>2</sub> yang mewakili emisi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan parameter SO<sub>2</sub> mewakili emisi industri dan kendaraan diesel. Tahun 2020, IKU Nasional memiliki predikat baik<sup>40</sup>.

Sementara berdasarkan pengukuran di Kota Bogor yang dapat diakses melalui situs web Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor<sup>41</sup>, Parameter-parameter kualitas udara terutama gas-gas dan partikulat tersuspensi di Kota Bogor relatif memenuhi persyaratan baku mutu kualitas udara ambien. Namun kadar debu dan tingkat kebisingan di beberapa lokasi masih berada di atas ambang batas, terutama karena banyaknya kendaraan di lokasi tersebut yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi Kota Bogor sebagai daerah penyangga DKI Jakarta..

Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) pun dilakukan setiap tahun dengan menggunakan Indeks Pencemar dengan mempertimbangkan segmen hulu, tengah dan hilir Daerah Aliran Sungai pada kondisi musim hujan dan kemarau. Pada tahun 2020, IKA Nasional berada pada predikat cukup baik.

Di Kota Bogor pada umumnya kualitas air sungai kurang memenuhi persyaratan baku mutu, terutama tingginya kadar BOD (*Biological Oxygen Demand*). Demikian pula kualitas air situ (danau) kurang memenuhi persyaratan baku mutu terutama untuk parameter kadar BOD, COD (*Chemical Oxygen Demand*), ammonia dan nitrit. Pencemaran air terutama disebabkan oleh limbah industri yang tidak dikelola dengan baik, serta limbah domestik baik sampah maupun limbah cair akibat sanitasi yang tidak layak.

---

<sup>39</sup> World Health Organization. (2022, April). *Air quality database*. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/who-air-quality-database>

<sup>40</sup> Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Statistik Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan 2020*.

<sup>41</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. (n.d.). *Ragam Data*. Retrieved June 11, 2022, from [https://dinaslingkunganhidup.kotabogor.go.id/index.php/ragam\\_data#](https://dinaslingkunganhidup.kotabogor.go.id/index.php/ragam_data#)

## B. Pengelolaan Sampah

Paradigma lama pengelolaan sampah dengan pendekatan penanganan akhir yaitu “kumpul – angkut – buang” ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sudah saatnya ditinggalkan. Sementara, kapasitas TPA sampah, khususnya di kota besar, sudah semakin penuh dan tidak mudah untuk mencari lahan TPA baru.

Sesuai Undang – Undang No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah dipandang sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk kompos, energi, bahan bangunan maupun sebagai bahan baku industri. Sedangkan yang dibuang adalah sampah yang benar-benar sudah tidak dapat dimanfaatkan, karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Dengan demikian volume sampah dapat dikurangi.

Pengelolaan sampah seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif. Sejak dari hulu, yaitu sebelum sampah dihasilkan, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sesudah digunakan sehingga menjadi sampah, dan kemudian dikembalikan secara aman ke lingkungan. Konsep ini biasa disebut dengan 3R yaitu Reduce (Pengurangan) – Reuse (Penggunaan kembali) – Recycle (Pendaurlangan) dengan menggunakan paradigma baru penanganan sampah yaitu “kumpul – pilah – olah – angkut”<sup>42</sup>.

Direktur Sanitasi, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ir. Prasetyo, M.Eng menyatakan bahwa pengelolaan sampah dari sisi sarana dan prasarana telah menjadi fokus penting bagi kementerian ini. Sayangnya, menurut data Survei Kesadaran Manajemen Sampah *Waste4Change* 2019 terhadap 429 responden di DKI Jakarta dan sekitarnya, saat ini baru 49% rumah tangga yang memilah sampah dan masih ada 50% rumah tangga yang tidak memilah sampah<sup>43</sup>. Di luar DKI Jakarta, kesadaran memilah

---

<sup>42</sup> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. (n.d.). *Paradigma Baru Pengelolaan Sampah*. <https://www.dlhk.jogjapro.go.id/paradigma-baru-pengelolaan-sampah>

<sup>43</sup> Kompas Cyber Media. (2020, December 18). *Indonesia Hasilkan 64 Juta ton Sampah, Bisakah Kapasitas Pengelolaan Tercapai Tahun 2025?* KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/18/070200023/indonesia-hasilkan-64-juta-ton-sampah-bisakah-kapasitas-pengelolaan?page=all>

sampah masih lebih rendah lagi. Tren pemberdayaan Bank Sampah menjadi suatu keniscayaan dan sudah seharusnya ada di semua RW.

## 2.2.6. Analisis Tren dan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

### a. Peraturan Perundang-undangan

Berikut peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dan mendukung pengembangan *Smart City* di Indonesia:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
- Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

b. Standar Nasional Indonesia

Di samping peraturan perundang-undangan, terdapat Standar Nasional Indonesia yang terkait dengan *Smart City* yang merupakan adopsi dari standar International Standard Organization (ISO), yaitu:

- SNI ISO 37120:2018 tentang pembangunan Perkotaan dan Masyarakat yang Berkelanjutan – Indikator-Indikator untuk Layanan Perkotaan dan Kualitas Hidup

- SNI ISO 37122:2019 tentang Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator untuk kota cerdas.

Hubungan antara berbagai standar ini dapat dilihat pada gambar berikut.



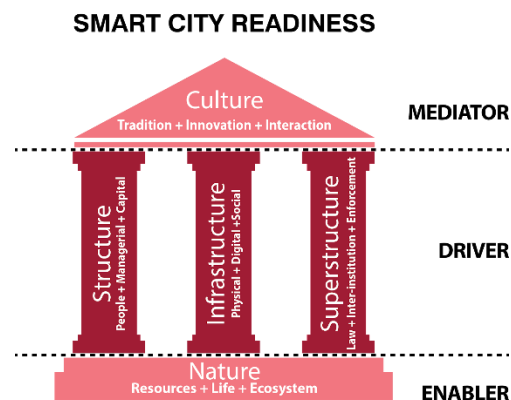
*Gambar 2. 18 Hubungan antara standar ISO 37120 dan 37122*



### 3. ANALISIS KESIAPAN DAERAH

Analisis kesiapan daerah merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai kondisi daerah saat ini guna mendapatkan gambaran kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menerapkan program-program pembangunan *smart city*. Di dalam analisis kesiapan *smart city* daerah, terdapat lima aspek utama yang menjadi komponen kajian, yaitu:

1. *Nature* atau komponen alamiah dari suatu daerah, yaitu sumber daya alam dan ekosistem lingkungan hidup.
2. Struktur, atau komponen inti dari sebuah daerah, yaitu sumber daya manusia, kapasitas keuangan daerah, dan sumber daya pemerintah daerah.
3. Infrastruktur, atau komponen sarana dan prasarana fisik daerah yang terdiri dari infrastruktur sosial, infrastruktur digital, dan infrastruktur fisik lainnya.
4. Suprastruktur, atau komponen kelembagaan dan non-fisik yang terdapat di daerah seperti lembaga sosial dan pemerintahan, regulasi dan kebijakan, dan hubungan antar-lembaga.
5. *Culture*, atau komponen budaya di daerah, seperti kesiapan masyarakat dan tradisi.



Gambar 3. 1 Aspek Kesiapan Smart City Daerah

#### 3.1. Analisis Nature

Analisis *Nature* Daerah dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan alam di wilayah dan di sekitar wilayah di mana *Smart City* akan dikembangkan. Secara umum, pengukuran pada

komponen *nature* ini melihat potensi dan tantangan apa saja yang terdapat di wilayah tersebut bagi pengembangan *Smart City* dari aspek lingkungan hidup.

### **3.1.1 Kondisi Geografi dan Demografi**

#### **3.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

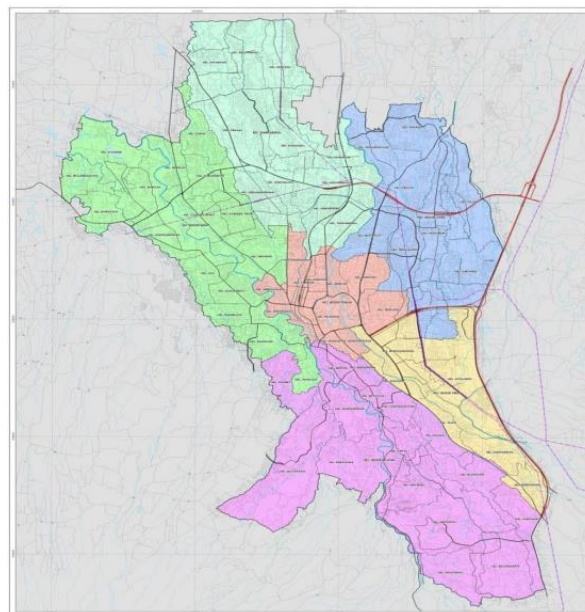
Luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.138 hektar yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Keenam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Tanah Sareal. Kecamatan Bogor Selatan mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 3.050 hektar dan terdiri dari 16 kelurahan, sedangkan Kecamatan Bogor Tengah mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 837 hektar dan terdiri dari 11 kelurahan. Untuk luas wilayah menurut kecamatan tersaji pada Tabel 2.1. Secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cijeruk, dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Bogor Selatan	3.050
2	Bogor Timur	1.048
3	Bogor Utara	1.812
4	Bogor Tengah	837
5	Bogor Barat	2.331
6	Tanah Sareal	2.060
<b>Jumlah</b>		<b>11.138</b>

Sumber : Perda No. 6 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031



Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018

Gambar 3. 2 Peta Wilayah Kota Bogor

### 3.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara  $106^{\circ}43'30''\text{BT}$  –  $106^{\circ}51'00''\text{BT}$  dan  $6^{\circ}30'30''\text{LS}$  –  $6^{\circ}41'00''\text{LS}$ . Kedudukan geografi Kota Bogor berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan DKI Jakarta. Jarak Kota Bogor dengan Kota Jakarta kurang

lebih 60 kilometer dan dengan Kota Bandung sekitar 120 kilometer. Hal ini menjadi potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Berdasarkan hasil foto udara diketahui sebagian dari total wilayah Kota Bogor merupakan kawasan yang sudah terbangun, kecuali di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Area terbangun paling luas berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah.

#### A. Topografi

Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi, ketinggian minimum 190 meter dan ketinggian maksimum 330 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0–2 persen, untuk luasan lahan datar seluas 1.763,94 hektar dan tersebar di enam kecamatan. Seluas 8.091,19 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2–15 persen, seluas 1.109,92 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15–25 persen, seluas 765,21 hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 25–40 persen dan lahan sangat curam seluas 119,74 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen. Kecamatan Bogor Selatan merupakan daerah di Kota Bogor yang tergolong sangat rawan terhadap Bahaya Longsor, karena mempunyai kemiringan lebih dari 40 persen atau sangat curam sehingga daerah tersebut sangat rawan terhadap Bahaya Longsor.

#### B. Geologi

Jenis tanah hampir diseluruh wilayah Kota Bogor adalah latosol coklat kemerahan dengan luasan 8.496,35 hektar, kedalaman efektif tanah lebih dari 90 centimeter dengan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi. Kemudian jenis tanah lain yang juga menyebar di enam Kecamatan yaitu aluvial kelabu dengan luasan 1.157,9 hektar. Kondisi geologi di Kota Bogor yaitu tufa dengan luasan 3.395,17 hektar yang tersebar di enam kecamatan dengan Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi tufa terbesar. Sedangkan kipas aluvial dengan luasan 3.249,98 hektar dan Kecamatan Bogor Utara menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi kipas aluvial.

### C. Hidrologi

Di wilayah Kota Bogor terdapat enam lokasi mata air, empat lokasi air tanah dalam dan dua lokasi air tanah dangkal yang biasa digunakan untuk air minum non perpipaan. Kapasitas sumber mata air dan air tanah dalam mengalami penurunan dibanding tahun 2011. Demikian pula kapasitas air tanah dalam, dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan. Berkurangnya resapan air disebabkan karena bertambahnya daerah permukiman di wilayah Kota Bogor. Lahan di Kota Bogor hingga tahun 2012 masih banyak lahan tidak kritisnya yaitu sekitar 81,45 persen (9.651,98 ha). Sementara lahan kritisnya mencapai 1,82 persen (215,47 ha). Sisanya agak kritis 2,49 persen (295,07 ha) dan potensial kritis 14,24 persen (1.687,48 ha). Lahan kritis banyak terdapat di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Semua Kelurahan di daerah tersebut mengandung lahan kritis kecuali Kelurahan Cikaret. Lahan potensial kritis selain di Kecamatan Bogor Selatan juga banyak terdapat di Kecamatan Bogor Barat. Beberapa danau, situ dan kolam di Kota Bogor ada yang berfungsi untuk irigasi, retensi dan rekreasi. Situ Leutik dan Situ Panjang difungsikan sebagai irigasi. Situ Gede dan Situ Curug difungsikan sebagai irigasi dan retensi. Situ Danau Bogor Raya, dan Situ Anggalena selain difungsikan sebagai Retensi juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Danau atau situ terluas di Kota Bogor adalah Situ Gede dengan Luas Layanan 4 Ha dan Situ Danau Bogor Raya dengan Luas Layanan 7,5 Ha. Di wilayah Kota Bogor dilalui oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Sungai Cisadane mempunyai luas pengaliran 185 kilometer persegi dan Sungai Ciliwung mempunyai luas pengaliran 211 kilometer persegi. Menurut hasil pengukuran debit tahun 2004, setiap satu kilometer persegi Sungai Cisadane memiliki debit 75,8 liter per detik dan setiap satu kilometer persegi Sungai Ciliwung memiliki debit 74,1 liter per detik. Untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total coliform dalam air sungai, melebihi kriteria baku. Kondisi yang mirip juga terdapat pada air situ yang umumnya berkualitas di bawah persyaratan baku mutu. Sedangkan air sumur penduduk, nilai pH-nya cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri e-coli sedikit di atas kriteria yang disyaratkan

#### D. Klimatologi

Udara di Kota Bogor cukup sejuk dengan suhu udara rata-rata tiap bulannya mencapai 33,90C, dengan suhu terendah 18,80C dan suhu tertinggi 36,10 C. Suhu seperti itu antara lain dipengaruhi guyuran hujan dengan intensitas rata-rata 3.654 mm per tahun, dan curah hujan bulanan berkisar antara 79,0 – 652,0 mm dengan rata-rata hujan 14 hari per bulan dan kelembaban udara 70%. Sedangkan kecepatan angin rata-rata per tahun 2 km/jam dengan arah Timur Laut. Kualitas udara Kota Bogor secara keseluruhan dapat dikatakan baik atau sehat. Beberapa parameter kualitas udara Kota Bogor relatif tidak membahayakan lingkungan, karena gas-gas dan partikulat tersuspensi yang dihasilkan, pada umumnya masih di bawah ambang batas baku mutu udara ambien. Namun kadar debu dan tingkat kebisingan pada beberapa lokasi masih berada di atas persyaratan ambang batas yang ditentukan.

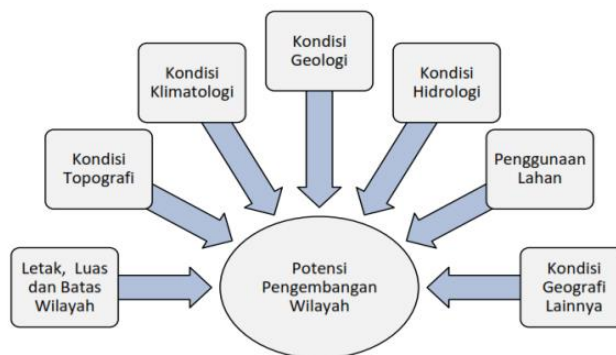
#### E. Tata Guna Lahan

Penggunaan lahan tertinggi di Kota Bogor Sebesar 5.023,59 Hektar atau 45,10 Persen, merupakan kawasan perumahan dan permukiman. sedangkan untuk lahan pertanian seluas 2.910,97 hektar (26,13%), industri seluas 112,07 hektar (1,006%), perdagangan dan jasa seluas 138,79 hektar (1,24%). Lahan lainnya masih berupa hutan kota seluas 141,13 hektar (1,26%), kebun raya seluas 72,12 hektar (0,61%), serta tempat pemakaman umum seluas 137,87 hektar (1,23%), Sungai/Situseluas 171,69 hektar (1,54%). Luas kawasan lahan pertanian tanaman pangan di enam kecamatan pada tahun 2021 yaitu 127,42 hektar. Kecamatan Bogor Barat mempunyai luasan kawasan lahan pertanian tanaman pangan terbesar yaitu 77,99 hektar.

Tabel 3. 2 Luas Perubahan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Per Kelurahan di Kota Bogor

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan	Luas Kawasan Pertanian (ha)
1	Bogor Barat	Bubulak	Kawasan Pertanian Non LP2B	6,64
2	Bogor Barat	Margajaya	Kawasan Pertanian Non LP2B	11,53
3	Bogor Barat	Balumbangjaya	Kawasan Pertanian Non LP2B	0,35
4	Bogor Barat	Pasirjaya	Kawasan Pertanian LP2B	21,64
5	Bogor Barat	Sindangbarang	Kawasan Pertanian Non LP2B	9,63
6	Bogor Barat	Situgede	Kawasan Pertanian Non LP2B	28,20
7	Bogor Timur	Katulampa	Kawasan Pertanian LP2B	11,63
8	Bogor Selatan	Cikaret	Kawasan Pertanian LP2B	6,70
9	Bogor Selatan	Pakuan	Kawasan Pertanian LP2B	3,90
10	Bogor Selatan	Rancamaya	Kawasan Pertanian Non LP2B	11,17
11	Bogor Selatan	Mulyaharja	Kawasan Pertanian LP2B	14,79
12	Bogor Selatan	Mulyaharja	Kawasan Pertanian Non LP2B	1,24
Jumlah				<b>127,42</b>

Berdasarkan uraian berbagai aspek Geografi dan Demografi beserta unsur unsur sebagaimana Gambar 12.



Gambar 3. 3 Aspek yang mempengaruhi Potensi Pengembangan Wilayah

Maka Kota Bogor memiliki potensi dalam pengembangan kawasan budi daya sebagai Kawasan:

- Perumahan dan Permukiman
- Perdagangan dan Jasa
- Pendidikan, dan Penelitian pengembangan
- Wisata alam dan non alam
- Aktivitas ekonomi kreatif
- Pertanian *off farm* dengan penerapan Teknologi pendukung pertanian

## 3.2. Analisis Struktur

### 3.2.1. Analisis Kualitas SDM Daerah

Analisis kualitas sumber daya manusia daerah dilakukan untuk mengukur tingkat kapasitas masyarakat di daerah dalam menerima konsep *Smart City*. Beberapa informasi yang perlu diketahui di dalam analisis ini adalah tingkat literasi masyarakat terhadap *Smart City* yang nanti akan sangat membutuhkan partisipasi aktif dan positif dari masyarakat di daerah.

*Tabel 3. 3 Analisis Kualitas SDM Daerah*

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Jumlah komunitas minat bakat/ hobi/ kreatif di daerah	Baik	✓		
2	Adanya komunitas pengembang/ developer perangkat lunak TIK di daerah	Baik	✓		
3	Adanya digital startup di daerah	Baik	✓		
4	Adanya perguruan tinggi di daerah	Baik	✓		
5	Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi dari pemerintah daerah	Baik	✓		
6	Jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam satu tahun	Baik	✓		
7	Jumlah angka kriminalitas dalam satu tahun	Baik	✓		
8	Jumlah tindakan perusakan fasilitas umum dalam satu tahun	Baik	✓		
9	Jumlah kegiatan tawuran antar kelompok warga dalam satu tahun	Baik	✓		



Terdapat banyak komunitas minat bakat/hobi/kreatif di daerah, komunitas seperti ARSA BOGOR<sup>44</sup>, Bogor Ngariung<sup>45</sup>, dan Jagaasa<sup>46</sup> merupakan komunitas yang saling bersinergi memberikan manfaat untuk Kota Bogor. Selain itu terdapat lebih dari 150 ormas dan LSM yang terdaftar di Kesbangpol Kota Bogor<sup>47</sup>. Komponen komunitas pengembang dan atau developer perangkat lunak TIK di Kota Bogor ada pada kondisi baik karena sebanyak 25.000 anak muda Kota Bogor mendapatkan beasiswa coding bersertifikat. Menurut data pelaku ekonomi kreatifitas Kota Bogor 2019 komunitas pengembang dan atau developer perangkat lunak TIK terdiri dari pembuat aplikasi, programmer, desain grafis, pengembang video game, dan IT Konsultan. Digital startup di Kota Bogor berkembang dengan baik setidaknya terdapat 15 Digital Startup bidang pengembangan software terbaik seperti Bislitech Indonesia, DeTech, Leif-Tech, Loolin, Maxsamasta, Maxweb, Pusat Mesin Antrian, ProTeknologi, Pukado, Qeraton<sup>48</sup>. Dari komponen adanya perguruan tinggi Kota Bogor memiliki 1.487 sekolah, 1 Institut, 2 politeknik, 14 Sekolah tinggi, serta 7 Universitas.

### 3.2.2. Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan

Analisis terhadap sumber daya pemerintahan dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan program *Smart City* dimana di dalamnya dituntut adanya integrasi dan interoperabilitas di dalam proses bisnis pemerintah daerah. Di samping itu, sebagai unsur yang menjadi penggerak dari *Smart City*, kesiapan pemerintah daerah di dalam melaksanakan *Smart City* merupakan faktor kunci keberhasilan *Smart City*. Sehingga di dalam analisis terdapat lebih banyak butir-butir informasi yang perlu ditelaah lebih lanjut di dalam analisis kesiapan pemerintah daerah.

---

<sup>44</sup> <https://ctarsafoundation.org/read/17/komunitas-arsa>

<sup>45</sup> <https://bogorngariung.com/>

<sup>46</sup> <http://jagaasa.kotabogor.go.id/>

<sup>47</sup> [https://www.kotabogor.go.id/index.php/show\\_post/detail/662/johny-indo-beri-pencerahan-kepada-lsm-dan-ormas-di-kota-bogor](https://www.kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/662/johny-indo-beri-pencerahan-kepada-lsm-dan-ormas-di-kota-bogor)

<sup>48</sup> <https://www.teknovida.com/software-house-bogor/>

*Tabel 3. 4 Analisis Kualitas SDM Pemerintahan*

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas	Baik	✓		
2	Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan Ilmu Komputer/Teknik Informatika	Baik	✓		
3	Jumlah relawan TIK di daerah	Baik	✓		
4	Persentase jumlah unit komputer (PC & Laptop) terhadap jumlah pegawai	Baik	✓		
5	Persentase pegawai berusia 50 tahun ke atas terhadap jumlah pegawai	Baik	✓		
6	Persentase pegawai berusia 40 -50 tahun terhadap jumlah pegawai	Baik	✓		
7	Persentase pegawai berusia 25 -40 tahun terhadap jumlah pegawai	Baik	✓		
8	Jumlah sistem informasi yang digunakan di pemerintah daerah	Baik	✓		
9	Persentase ketersediaan jaringan broadband access terhadap jumlah kantor pemerintahan	Baik	✓		
10	Persentase ketersediaan jaringan LAN/WAN di kantor pemerintahan	Baik	✓		
11	Jumlah lokasi wireless internet (hotspot) di kawasan perkantoran pemerintahan	Baik	✓		
12	Ketersediaan data center (baik yang dikelola sendiri maupun manage service) untuk kepentingan pemerintahan	Baik	✓		
13	Ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan	Baik	✓		
14	Ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang interoperable	Baik	✓		
15	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang interoperable	Baik	✓		

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
16	Ketersediaan sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah yang interoperable	Baik	✓		
17	Ketersediaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang interoperabel	Baik	✓		
18	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah yang interoperabel	Baik	✓		
19	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi daerah yang interoperabel	Baik	✓		
20	Ketersediaan sistem informasi pelayanan publik yang interoperable	Baik	✓		

Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas (661/6894) S2 656 dan S3 5 orang, Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan Ilmu Komputer/Teknik Informatika ada 75 orang, terdapat lebih dari 100 relawan TIK di kota Bogor, Jumlah unit komputer (PC & Laptop) terhadap jumlah pegawai ada dalam kondisi sangat baik.

Sampai dengan tahun 2022 persentase pegawai berusia 50 tahun ke atas terhadap jumlah pegawai 39 %, pegawai berusia 40 -50 tahun terhadap jumlah pegawai adalah 33 % sedangkan pegawai berusia 25-40 tahun terhadap jumlah pegawai adalah 27%. Terdapat 215 aplikasi daerah yang digunakan untuk mendukung jalannya sistem informasi di pemerintah daerah Kota Bogor. Semua kantor pemerintahan di Kota Bogor sudah memiliki ketersediaan jaringan *broadband access*, LAN/WAN dan memiliki wireless internet (hotspot), kota Bogor memiliki Pusat Data terletak di Lt. IV Gedung Sekda Kota Bogor yang melayani seluruh Perangkat daerah.

Rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan tersedia di tingkat perangkat daerah, di tingkat kota masih dalam penyusunan peraturan walikota. Sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang wajib digunakan oleh Pemda dan peruntukannya adalah untuk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang interoperable, sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah (e-office), sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah menggunakan SIMPEG Kota Bogor.

Ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi daerah yang interoperable. Kota Bogor meraih penghargaan JDIH terbaik level nasional<sup>49</sup>, sebagai bukti penyelenggaraan Sistem informasi pengelolaan legislasi daerah kota Bogor. Sedangkan sistem informasi pelayanan publik terdapat 174 layanan publik yang paling banyak digunakan adalah e-SPPT PBB, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, e-menanduk atau sikancil berlari layanan online kependudukan berbasis web<sup>50</sup>.

### 3.2.1 Analisis Kapasitas Keuangan Daerah

Analisis terhadap kapasitas keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui seberapa besar sumber daya yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mensukseskan pelaksanaan *Smart City*. Melalui analisis ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memperkirakan alokasi sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan dan keuangan yang dapat dialokasikan untuk program *Smart City*. Disamping itu, melalui analisis ini, Pemerintah Daerah juga didorong untuk dapat mulai mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif atau sumber pembiayaan pihak ketiga lainnya sebagai sumber daya dalam hal keuangan untuk menjalankan program *Smart City*.

*Tabel 3. 5 Analisis Kapasitas Keuangan Daerah*

No.	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	Baik	✔		
2	Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu (2021)	Baik	✔		
3	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah (2021)	Baik	✔		
4	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja Daerah	Baik	✔		
5	Jumlah Anggaran untuk Belanja <i>Smart City</i> yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2022	Baik	✔		
6	Jumlah Anggaran untuk Belanja <i>Smart City</i> yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2022	Baik	✔		
7	Jumlah program pembangunan untuk mendukung <i>Smart City</i> di daerah	Baik	✔		

<sup>49</sup> <https://www.radarbogor.id/2021/12/15/kota-bogor-diganjar-penghargaan-jdih-terbaik-i-dari-kemenkumham/>

<sup>50</sup> <https://disdukcapil.kotabogor.go.id/sikancil-berlari/>

No.	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
8	Nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah	Baik	✓		
9	Jumlah sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung <i>Smart City</i>	Baik	✓		

Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah adalah 36.8 %, Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per tahun 2021 adalah 327.542.156.075, 31 Rupiah, Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah per tahun 2021 adalah 44%. Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja Daerah 16.9%. Terdapat 47 program misi cerdas pembangunan diselenggarakan untuk mendukung Smart City di daerah, dan Investasi sebesar 2,53 Triliun untuk mendukung pembangunan daerah, sumber pendanaan pembangunan alternatif melibatkan pihak Swasta dan BUMN melalui CSR digunakan untuk mendukung *Smart City*.

### 3.3. Analisis Infrastruktur

#### 3.3.1 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur fisik daerah dilakukan untuk mengukur kondisi sarana dan prasarana fisik daerah yang menjadi titik tolak dalam pembangunan *Smart City* daerah. Dengan mengetahui posisi saat ini dalam hal infrastruktur fisik, maka pemerintah daerah akan dapat mengukur seberapa banyak pembangunan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mencapai visi *Smart City* daerah.

*Tabel 3. 6. Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah*

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	Baik	✓		
2	Persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal	Baik	✓		
3	Persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik	Baik	✓		
4	Persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik	Baik	✓		

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
5	Adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis	Baik	✓		
6	Adanya kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat	Baik	✓		
7	Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik	Baik	✓		
8	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik	Baik	✓		

Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik per tahun 2020 adalah 83,47%, Persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal adalah 66,7%. Persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik, rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik, kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis terletak di Kawasan Pemerintahan & Perkantoran & Komersial di sekitar Kebun Raya, (Pusat Kota Lama), Kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat, Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non-formal dan informal, Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik. Kesiapan infrastruktur fisik kota Bogor dapat mendukung kelanjutan pembangunan *Smart City*.

### 3.3.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur digital daerah diperlukan untuk mengukur kesiapan daerah dalam melaksanakan program *Smart City*, mengingat di dalam konsep *Smart City*, teknologi merupakan enabler yang dapat memberikan percepatan terhadap hasil capaian dari *Smart City*.

*Tabel 3. 7 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah*

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G	Baik	✓		

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
2	Tersedianya jaringan broadband access untuk masyarakat	Baik	✓		
3	Jumlah lokasi wireless untuk publik	Baik	✓		
4	Persentase rumah tangga yang terlayani listrik	Baik	✓		
5	Jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan (dalam jam)	Baik	✓		
6	Jumlah sekolah yang memiliki akses internet	Baik	✓		
7	Jumlah rumah sakit yang menggunakan sistem layanan elektronik/online	Baik	✓		

80% luas area kota Bogor terlayani dengan jaringan 4G atau 3G, jaringan broadband access disediakan untuk masyarakat berupa wifi publik 70 titik (setiap kecamatan), 8 titik milik pemprov Jawa Barat, 62 titik dari Dinas Kominfo. 100% rumah tangga yang terlayani listrik, minim pemadaman listrik setiap bulan, lebih dari 80% akses internet jaringan dibangun secara mandiri tidak disediakan gratis oleh pemerintah. Rumah sakit sudah menggunakan sistem layanan elektronik/online melalui penyediaan BPJS dan JKN, Pcare, E-Sir, SIM RS, Sisrute, Booking online, RS online, didorong kerja sama dengan telemedicine. Kesiapan infrastruktur digital kota Bogor dapat mendukung pembangunan Smart City

### 3.3.3 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

Analisis kesiapan infrastruktur sosial di daerah dilakukan untuk mengukur kondisi kesiapan infrastruktur di daerah yang terkait dengan kewargaan. Kebutuhan akan sarana prasarana sosial merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan partisipasi dan keguyuban warga kota disaat *Smart City* akan dan mulai dilaksanakan.

*Tabel 3. 8. Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah*

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Adanya pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat kelurahan/desa	Baik	✓		
2	Adanya Ruang Terbuka Publik di tingkat RW	Baik		✓	
3	Adanya aula/balai warga di tingkat kelurahan/desa	Baik	✓		
4	Jumlah fasilitas olahraga di tingkat kelurahan/desa	Baik	✓		
5	Ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah	Baik	✓		

Kota Bogor memiliki kegiatan belajar masyarakat di setiap kelurahan/desa seperti kegiatan mengaji bersama, belajar bersama dan diskusi diskusi antar warga, terdapat ruang terbuka publik namun tidak di setiap RW, terdapat aula/balai warga di setiap kelurahan/desa, dan masing masing desa memiliki fasilitas olahraga dan memiliki perpustakaan umum yang dikelola pemerintah daerah.

### 3.4. Analisis Suprastruktur (Kebijakan dan Kelembagaan)

#### 3.4.1 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

Aspek kebijakan merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan sebuah program pembangunan. Begitupun dengan inisiatif *Smart City* yang dilaksanakan di daerah, memerlukan seperangkat kebijakan untuk menjamin pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar dan berkelanjutan.



*Tabel 3. 9 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah*

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Adanya Peraturan Daerah tentang Dewan <i>Smart City</i> Daerah	Baik	✓		
2	Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Tim Pelaksana <i>Smart City</i> Daerah	Baik	✓		
3	Adanya Rencana Induk <i>Smart City</i> daerah	Baik	✓		
4	Adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk <i>Smart City</i> Daerah	Baik	✓		
5	Adanya visi pembangunan <i>Smart City</i> yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah	Baik	✓		
6	Adanya kepastian terhadap keberlanjutan program <i>Smart City</i> dalam jangka panjang	Baik	✓		
7	Adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program <i>Smart City</i>	Baik	✓		

Dewan Smart City Kota Bogor ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Nomor 040.45-230 Tahun 2017 Tentang dewan dan Tim Pelaksana Smart City Kota Bogor Tahun 2017, Kota Bogor sudah memiliki Rencana Induk Smart City Kota Bogor 2017-2021, dan berkomitmen melanjutkan program Smart City melalui penyusunan Rencana Induk Smart City periode 2022-2027. Mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program Smart City kota Bogor diterapkan melalui keputusan Wali Kota Bogor Nomor 800.45-441 Tahun 2019 tentang Pernyataan Prestasi Luar Biasa Baiknya Pegawai Negeri SIPIL di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Visi pembangunan daerah Kota Bogor adalah mewujudkan Kota Bogor sebagai kota Ramah Keluarga dengan misi mewujudkan kota yang Sehat, Kota yang Cerdas, kota yang Sejahtera sudah selaras dengan Visi pembangunan Smart City kota Bogor tahun 2017 yaitu “Kota Pusaka yang cerdas yang efisien, transparan dan partisipatif”.

Secara keseluruhan dari sudut pandang Suprastruktur Kota Bogor siap melanjutkan program pembangunan *Smart City*.

### 3.4.2 Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah

Kelembagaan daerah merupakan perangkat non-fisik selanjutnya setelah kebijakan yang sangat menentukan keberlanjutan pelaksanaan *Smart City* di daerah dari sisi pengelola kota, yaitu pemerintah daerah. Di dalam aspek kelembagaan ini, nantinya akan diatur pembagian peran dalam pelaksanaan *Smart City*. Oleh karena itu, aspek kelembagaan menjadi salah satu bagian dari analisis kesiapan *Smart City* di daerah.

*Tabel 3. 10. Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah*

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Adanya Dewan <i>Smart City</i> Daerah	Baik	✓		
2	Adanya Tim Pelaksana <i>Smart City</i> Daerah	Baik	✓		
3	Adanya SOP <i>Smart City</i> daerah	Baik	✓		
4	Adanya tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Pelaksana <i>Smart City</i> di setiap OPD	Baik	✓		

Dewan *Smart City* Kota Bogor ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Nomor 040.45-230 Tahun 2017 Tentang dewan dan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Bogor Tahun 2017, Kota Bogor sudah memiliki Rencana Induk *Smart City* Kota Bogor 2017-2021, dan berkomitmen melanjutkan program *Smart City* melalui penyusunan Rencana Induk *Smart City* periode 2022-2027. Secara keseluruhan dari kesiapan suprastruktur Kota Bogor siap melanjutkan program pembangunan *Smart City*.

### 3.5. Analisis Culture

#### 3.5.1 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

Aspek ini menjadi salah satu aspek dalam kesiapan *Smart City* karena di dalam sebuah *Smart City*, aspek partisipasi masyarakat yang digerakkan di dalam organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu inti dari *Smart City*.

*Tabel 3. 11 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah*

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Kurang
1	Adanya lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi di daerah	Baik	✓		
2	Adanya forum-forum swadaya masyarakat pendukung <i>Smart City</i>	Baik	✓		
3	Jumlah forum swadaya masyarakat pendukung <i>Smart City</i>	Baik	✓		
4	Dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung <i>Smart City</i>	Baik	✓		
5	Jumlah forum pendukung <i>Smart City</i> yang memiliki sekretariat definitif	Baik	✓		
6	Adanya partisipasi pakar dari perguruan tinggi lokal dalam Dewan <i>Smart City</i> Daerah	Baik	✓		

Terdapat LPPM di setiap perguruan tinggi di Kota Bogor, beberapa forum swadaya masyarakat pendukung *Smart City* forum Ekonomi Kreatif, Komunitas Hijau Kota Bogor, Bogor Youth Forum, Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar Mulya Harja), forum Ekonomi Kreatif (Disparbud) tahun 2021-2023 mendapatkan dukungan dari Dinas Pariwisata dan Budaya; dan para ahli dilibatkan dalam Dewan *Smart City* daerah diantaranya adalah: M. Iqbal S, M.Kom (Universitas Pakuan); Bayu A Prakosa M.T (Universitas Ibnu Khaldun); Dr. Yani Nur Hadriyani (IPB). Secara culture kota Bogor siap melanjutkan program pembangunan *Smart City*.

## 4. ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

---

### 4.1. Analisis Gap (Kesenjangan)

Analisis Gap digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara keadaan saat ini (aktual) dan keadaan pada masa akan datang (potensial). Kesenjangan akan digunakan sebagai referensi untuk menetapkan strategi dan langkah langkah untuk mengurangi kesenjangan yang ditemukan.

Analisis Gap dapat memperlihatkan tingkat ketimpangan antara tujuan masa depan yang ingin dicapai atau ingin terjadi, dari analisis masa depan, dan analisis kesiapan daerah. Kesenjangan inilah yang menjadi mata analisis di dalam bagian ini.

Kesenjangan antara kondisi Kota Bogor saat ini dengan tren masa depan dapat dilihat pada Tabel 4.1

*Tabel 4.1 Analisis Kesenjangan (Gap) Kota Bogor*

Dimensi	SUB DIMENSI	Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
<b>Smart Governance</b>	Pelayanan Publik	Pelayanan publik online berbasis aplikasi banyak jenisnya, penggunaan tidak optimal sehingga pelayanan masih kembali ke manual (kurang efisien)	Transformasi digital pada layanan publik yaitu penerapan SPBE (Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan lainnya) dengan Satu Data Indonesia yang terletak di Pusat Data Nasional	Perlu meningkatkan layanan publik online dengan data yang terintegrasi, dan meningkatkan adopsi aplikasi pelayanan publik
		Kuantitas dan kualitas SDM yang berlatar belakang TIK tidak mencukupi	Seluruh SDM pemerintahan memiliki kompetensi TIK/digital	Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dengan kompetensi TIK/digital, khususnya di pemerintahan dan aparaturnya pemerintahan Kelurahan
	Manajemen Birokrasi	Layanan internal pemerintahan kota belum 24 jam sedangkan layanan masyarakat sudah berfungsi 24 jam	Semua layanan publik baik internal pemerintah daerah maupun untuk masyarakat dapat berfungsi 24 jam	Perlu akselerasi layanan publik internal maupun eksternal yang berfungsi 24 jam, mewujudkan Bogor evolutive dan creative.
	Efisiensi kebijakan Publik	JDIH Kota Bogor sudah memiliki website	Web JDIH Kota Bogor belum terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain yang telah diluncurkan pemerintah.	Perlu terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain yang telah diluncurkan pemerintah.

Dimensi	SUB DIMENSI	Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan	
<b>Smart Branding</b>	Ekosistem Pariwisata	Kegiatan perdagangan skala kota dan regional sepanjang jalan utama belum tertata dengan baik	Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional sepanjang koridor jalan utama perlu ditata dengan baik	Pengendalian, revitalisasi (pembangunan kembali) dan peremajaan kota (Urban Renewal)	
		Penurunan jumlah wisatawan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, apalagi setelah pandemi Covid-19 berdampak pada pendapatan daerah.	Pariwisata dapat tetap berjalan namun tetap memperhatikan peraturan protokol Kesehatan	Perlu adanya promosi wisata terpadu baik daerah maupun kawasan secara lebih gencar dan masif, promosi terpadu melibatkan UMKM dan Layanan Wisata ( <i>Hotel, Food &amp; Beverage</i> )	
	Business Branding	Kegiatan dan transaksi perdagangan saat ini terjadi offline dan online selain menggunakan jaringan sosial media dan platform e-commerce yang beroperasi di Indonesia, Bogor memiliki platform khusus daerah kota Bogor yaitu: Bogor hitz commerce <a href="https://www.bogorhitz.com/">https://www.bogorhitz.com/</a>	Kota Bogor merupakan kota strategis dan potensial yang memiliki <i>city branding</i> (Heritage, Green and Smart) platform perlu diselaraskan dengan <i>city branding</i>	Pengembangan Bogor hitz commerce perlu dilakukan dengan menambahkan fitur-fitur yang lebih interaktif serta sosialisasi platform agar optimal pemanfaatannya oleh masyarakat. Dan Pengelolaan ruang kota berbasis potensi lokal dan komersial.	
	City Appearance Branding		Bogor merupakan tempat wisata sangat menarik dan potensial, terutama karena warisan budaya yang kuat, serta cuaca dan lingkungan yang asri, namun belum didukung	Tempat wisata dikemas menjadi kawasan strategis yang terintegrasi sehingga mengangkat potensi-potensi lain, Penunjuk tempat wisata terlihat jelas di mana-mana	Perlu informasi digital dan online terkait destinasi wisata kota Bogor yang dapat diakses dari mana saja.
			Warisan budaya di kota Bogor meninggalkan arsitektur khusus dan bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi ciri khas dan warisan budaya berharga	Era globalisasi, internasionalisasi berakibat pembangunan mengikuti dinamika modernisasi	Perlu penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah selaras dengan dinamika modernisasi

Dimensi	SUB DIMENSI	Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
<i>Smart Economy</i>	Membangun ekosistem industri yang berdaya saing ( <i>industry</i> )	Saat ini sudah disediakan platform Bogor Hitz untuk membantu pemasaran dan distribusi hasil produksi masyarakat khususnya UMKM di Kota Bogor. Perkembangan inkubator bisnis dan startup Bogor saat ini masih belum optimal	Pemerintah daerah mendukung promosi bisnis dan produk-produk daerah terutama UMKM, di antaranya melalui platform <i>e-commerce</i> dan peningkatan jumlah startup di Bogor dan inkubator bisnis Bogor	Perlu adanya pelatihan untuk menyiapkan UMKM daerah sehingga siap masuk ke <i>e-commerce</i> . Dapat juga dilakukan promosi bersama didukung oleh pemerintah daerah. Peningkatan ke inkubator bisnis diperlukan agar banyak startup berkembang
	Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat ( <i>Welfare</i> )	Daya saing ekonomi masyarakat Kota Bogor masih lemah, Peran pemerintah, pelaku usaha dan aktor intelektual dalam menumbuhkembangkan lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif belum sinergis	Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan Kreativitas dengan mengandalkan ide, pengetahuan, skill dan talenta, daripada sumber daya tenaga	Perlu menciptakan peningkatan pendapatan rumah tangga, penyerapan Angkatan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
	Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan ( <i>Transaction</i> )	Masyarakat Bogor memiliki literasi digital yang baik, dan sudah mengenal keuangan digital	Masyarakat bisa mengakses permodalan baik melalui pemerintah daerah, <i>crowd funding</i> dan <i>less cash society</i> sehingga kegiatan ekonomi lebih fleksibel	Perlu adanya bantuan permodalan yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dan perlu melakukan sosialisasi literasi keuangan digital bagi masyarakat

Dimensi	SUB DIMENSI	Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi <i>Gap</i> /Kesenjangan
<i>Smart Living</i>	Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Ruang belum optimal dan Masih belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh sesuai dengan 7 indikator kumuh yang telah ditetapkan.	Terwujud tata ruang wilayah yang harmonis	Perlunya tujuan harmonisasi tata ruang wilayah kota bogor untuk mencapai smart living masyarakat bogor
	Mewujudkan Prasarana Kesehatan (Health)	Sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan masih terbatas. Sistem informasi tenaga kesehatan belum sepenuhnya dapat menyediakan data yang akurat, terpercaya dan tepat waktu. Dukungan sumber daya pembiayaan dan lain-lain sumber daya belum memadai	Sinergi antara ketersediaan tenaga Kesehatan, dukungan data yang akurat dan pembiayaan akan meningkatkan kesehatan masyarakat.	Perlu peningkatan: pendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga Kesehatan, Data akurat, dan pembiayaan bidang kesehatan masyarakat
	Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (Mobility)	Konektivitas infrastruktur jaringan jalan dan jaringan utilitas perumahan dan permukiman belum optimal	Transportasi publik perlu ditata dan direncanakan dengan baik untuk pergerakan orang dan barang yang berdampak pada inefektivitas dan inefisiensi dalam sektor transportasi	Perlu dipertimbangkan kebijakan penataan transportasi publik dalam mekanisme dan penataannya, transportasi merupakan unsur vital dalam pembangunan daerah



Dimensi	SUB DIMENSI	Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
<i>Smart Society</i>	Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Community)	Partisipasi dan interaksi masyarakat di bangun melalui platform pengaduan masyarakat berbasis web <sup>51</sup> dan aplikasi SiBadra (Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran) adalah media bagi Masyarakat Kota Bogor untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, saran, dan permintaan layanan kegawatdaruratan kepada Pemerintah Kota Bogor secara real time.	Partisipasi dan interaksi masyarakat akan efisien jika masyarakat benar-benar memanfaatkan platform yang disediakan pemerintah.	Perlu peningkatan literasi platform pengaduan masyarakat berbasis web dan aplikasi melalui program edukasi dan sosialisasi
	Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (Learning)	Belum optimalnya akses dan mutu layanan Pendidikan dan kesehatan di kota Bogor	Akses dan mutu layanan Pendidikan dan Kesehatan menjadi parameter keberhasilan pembangunan	Perlu didorong optimalisasi akses dan mutu layanan Pendidikan dan Kesehatan di Kota Bogor
	Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (Security)	Keterbatasan program peningkatan kompetensi baik secara formal, daring terkait dengan penggunaan internet sehat untuk membangun SDM yang mampu memanfaatkan internet dengan baik dan bijak	Peningkatan kompetensi penggunaan internet sehat dan bijak dapat dilakukan secara daring baik berdasarkan program maupun mandiri	Perlu sosialisasi dan edukasi penggunaan teknologi internet sehat dan bijak lebih baik terutama di sekolah-sekolah
<i>Smart Environment</i>	Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (Protection)	Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah masih sangat terbatas	Semua daerah memiliki TPS yang memiliki pengelolaan sampah/mengurangi sampah ke Tempat Pembuangan Akhir .	Perlu edukasi pemilahan sampah dan waktu pembuangan sampah yang terjadwal, dan penanganan sampah yang terintegrasi sehingga sampah dapat dimanfaatkan secara

<sup>51</sup> <https://inspektorat.kotabogor.go.id/auth/mechanismepengaduanmasyarakat>

Dimensi	SUB DIMENSI	Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi <i>Gap</i> /Kesenjangan
				ekonomi sehingga bermanfaat untuk masyarakat, (TPA berbasis <i>circular economy</i> )
	Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah ( <i>Waste</i> )	Belum ada inisiatif pemisahan sampah sehingga volume sampah rumah tangga relatif tinggi	Sampah di pilah, sebagian dikelola sendiri dengan komposter, biopori atau secara komunitas dengan bank sampah (paradigma “kumpul – pilah – olah – angkut”)	Perlu sosialisasi pengelolaan sampah mandiri untuk mengurangi sampah rumah tangga yang harus dikelola pemerintah kota
	Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab ( <i>Energy</i> )	Energi terbarukan belum diberdayakan dengan baik,	Peningkatan penggunaan energi terbarukan untuk pembangkitan listrik seperti PLTMH, PLTS, dan sebagainya	Perlu memperbanyak PLTMH, PLTS dll untuk melengkapi PLTD yang ada, dengan bekerjasama dengan industri (misalnya dana CSR)

## 4.2. Analisis SWOT

### 4.3. Analisis SWOT untuk Setiap Dimensi

#### 4.3.1. Analisis TOWS Smart Governance

TOWS Smart Governance terkait dengan Pelayanan Publik, manajemen birokrasi yang efisien dan efisiensi kebijakan publik

*Tabel 4. 2 TOWS Smart Governance*

Analisis TOWS		
	Kekuatan	Kelemahan
<b>Faktor Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solid (terintegrasi dengan NIK), (Sikancil berlari sudah terintegrasi dengan BPJS, lebih dari 11 perangkat daerah sudah terintegrasi NIK.</li> <li>2. Sudah memiliki program berkesinambungan</li> <li>3. nilai kepuasan public Bogor Tinggi 97, ESPT masuk ke kemenpanrb, dukcapil nya menjadi pilot project.</li> <li>4. OPD bisa menjadi agent, duta untuk menyampaikan keunggulan kota Bogor.</li> <li>5. Pelayanan publik sudah digital , bogor evolutive dan creative.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi yang dibuat belum optimal sehingga pendaftaran beralih ke manual.</li> <li>2. Perubahan kebijakan Pusat menyebabkan integrasi NIK berhenti, menyebabkan perangkat daerah tidak bisa integrasi aplikasi.</li> <li>3. Masih ada perangkat daerah yang belum memiliki sarana TIK yang memadai.</li> <li>4. Perangkat SDM TIK perangkat daerah belum memiliki SOP dan skill TIK.</li> <li>5. Sarana prasarana warga disabilitas belum memadai</li> </ol>
<b>Faktor Eksternal</b>		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Standarisasi aplikasi mengarah ke arah integrasi dan interoperabilitas data, ekosistem dan subsistemnya terbangun dengan baik. Kominfo masuk kedalam asistensi penganggaran.</li> <li>7. Setiap OPD mempunyai channel dan akun medsos. Beberapa penghargaan terhadap aktivitas ini diraih.</li> <li>8. Penyederhanaan birokrasi, sudah disusun peta proses bisnis. (referensi arsitektur data)</li> <li>9. CCTV sudah berbagi pakai (dishub, kominfo, polresta, BIN, BPJT) sepanjang jalan protokol). Eskalasi sudah berjalan, -- sangat punya peran kalau difungsikan antar pihak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Koordinasi antar dinas masih belum solid</li> <li>7. Sebagian sarana prasarana mendukung wanita, lansia dan balita masih belum optimal</li> <li>8. COC internal (layanan/belum 24 jam) sedangkan COC external/layanan masyarakat sudah 24 jam</li> <li>9. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penatausahaan keuangan, pengawasan dan pelaporan.</li> <li>10. Belum tersedianya aplikasi Monev pelaksanaan pembangunan berbasis SIG.</li> </ol>
<b>Peluang</b>	<b>Strategi Peluang dan Kekuatan</b>	<b>Strategi Kelemahan dan Peluang</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MoU perlu dibuat per aplikasi dengan Adminduk.</li> <li>2. Integrasi data lowongan nasional dan internasional dapat dilakukan</li> <li>3. Literasi digital masyarakat sudah tinggi 87% menggunakan smartphone</li> <li>4. masih banyak warga disabilitas yang bisa diberdayakan.</li> <li>5. Banyak membangun aplikasi</li> <li>6. Banyak Sektor Swasta terlibat mewujudkan pelayanan public (crowdfunding dan creative funding)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan integrasi aplikasi pelayanan publik berbasis satu data, satu sumber dan terpusat.</li> <li>2. Peningkatan literasi digital masyarakat kota Bogor</li> <li>3. Pemberdayaan warga disabilitas dalam pemerintah kota</li> <li>4. Pemanfaatan crowdfunding dan creative funding sebagai sumber pendanaan pembangunan aplikasi dan layanan publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan dan peningkatan sarana TIK di masing masing OPD</li> <li>2. Peningkatan skill dan kompetensi SDM Pemerintah daerah di bidang TIK</li> <li>3. Pendataan kebutuhan sarpras untuk warga disabilitas</li> <li>4. Pembangunan budaya Kerjasama dan solid untuk menciptakan pelayanan yang efisien dan efektif terpadu, menghilangkan ego sektoral dan egosentris.</li> </ol>
<b>Ancaman</b>	<b>Strategi Ancaman dan Kekuatan</b>	<b>Strategi Kelemahan dan Ancaman</b>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Pusat tidak selaras dengan kebutuhan daerah.</li> <li>2. Adopsi aplikasi pelayanan publik masyarakat.</li> <li>3. Aplikasi wajib dari kementerian terlalu banyak, menyebabkan pelayanan kurang efisien</li> <li>4. Semakin banyak aplikasi (yang dibantu pihak ke-3) menyebabkan alokasi biaya pemeliharaan aplikasi naik. Biaya pemeliharaan aplikasi mahal.</li> <li>5. Aplikasi pusat jika eror susah koordinasi.</li> <li>6. pembuatan aplikasi mandiri dengan pihak ketiga banyak bermasalah (hit and run project)</li> <li>7. Regulasi Pemerintah terkait SIPD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiasati kebutuhan daerah yang tidak tercover oleh kebijakan pusat.</li> <li>2. Menciptakan portal aplikasi pelayanan publik yang dapat diakses masyarakat dan terpusat pada web utama pemerintah kota Bogor.</li> <li>3. Perlu perancangan SOP untuk MoU/MoA Kerjasama pembuatan aplikasi dengan pihak ketiga agar tidak ada Hit and Run dan meminimalisir biaya pemeliharaan aplikasi yang cukup mahal</li> <li>4. Mensosialisasikan pengajuan error handling aplikasi pusat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintegrasikan sistem informasi perencanaan penatausahaan keuangan, pengawasan dan pelaporan untuk memudahkan evaluasi.</li> <li>2. Meningkatkan kegiatan pelatihan dan sosialisasi penggunaan aplikasi pelayanan publik</li> </ol>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategi TOWS Smart Governance dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pembangunan integrasi aplikasi pelayanan publik berbasis satu data, satu sumber dan terpusat.
2. Peningkatan literasi digital masyarakat kota Bogor.
3. Pemberdayaan warga disabilitas dalam pemerintah kota
4. Pemanfaatan *crowdfunding* dan *creative funding* sebagai sumber pendanaan pembangunan aplikasi dan layanan publik
5. Pendataan dan peningkatan sarana TIK di masing masing OPD
6. Peningkatan skill dan kompetensi SDM Pemerintah daerah di bidang TIK
7. Pendataan kebutuhan sarpras untuk warga disabilitas

8. Pembangunan budaya Kerjasama dan solid untuk menciptakan pelayanan yang efisien dan efektif terpadu, menghilangkan ego sektoral, dan egosentris.
9. Menyiasati kebutuhan daerah yang tidak tercover oleh kebijakan pusat.
10. Menciptakan portal aplikasi pelayanan publik yang dapat diakses masyarakat dan terpusat pada web utama pemerintah kota Bogor.
11. Perlu perancangan SOP untuk MoU/MoA Kerjasama pembuatan aplikasi dengan pihak ketiga agar tidak ada *Hit and Run* dan meminimalisir biaya pemeliharaan aplikasi yang cukup mahal
12. Mensosialisasikan pengajuan *error handling* aplikasi pusat.
13. Mengintegrasikan sistem informasi perencanaan penatausahaan keuangan, pengawasan dan pelaporan untuk memudahkan evaluasi.
14. Meningkatkan kegiatan pelatihan dan sosialisasi penggunaan aplikasi pelayanan publik.

#### 4.3.2. Analisis TOWS *Smart Branding*

Sasaran dari *Smart Branding* adalah peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional pada pembangunan dan pemasaran ekosistem pariwisata , pembangunan *platform* dan pemasaran ekosistem bisnis daerah dan pembangunan dan pemasaran wajah kota. Dibawah ini merupakan analisis TOWS dari *Smart Branding*

*Tabel 4. 3 TOWS Smart Branding*

Analisis TOWS		
	Kekuatan	Kelemahan
Faktor Internal		

<b>Faktor Eksternal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Bogor memiliki banyak potensi pariwisata dan terus mengembangkan destinasi wisata, khususnya peninggalan budaya dan sejarah kerajaan pajajaran beserta pusaka dan bangunan bangunan bersejarah.</li> <li>2. Produk UMKM bervariasi dan mempunyai ciri khas Bogor</li> <li>3. Kota Bogor memiliki platform e-commerce BogorHitz dan sudah menggunakan media sosial untuk memasarkan produk-produk UMKM yang ada di Bogor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan branding objek wisata masih kurang</li> <li>2. Regulasi dan sarana prasarana yang mendukung branding daerah tidak optimal</li> <li>3. Belum optimal pemanfaatan teknologi yang mendukung branding pariwisata</li> <li>4. Kurangnya keterlibatan pemerintah dalam pengembangan UMKM</li> <li>5. Kesadaran masyarakat terhadap industri pariwisata kurang.</li> <li>6. Sosialisasi pada stakeholder pariwisata kurang</li> <li>7. Fasilitas ramah anak dan kaum disabilitas</li> </ol>
<b>Peluang</b>	<b>Strategi Peluang dan Kekuatan</b>	<b>Strategi Kelemahan dan Peluang</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bogor memiliki potensi wisata air</li> <li>2. Bisnis lokal (transportasi, souvenir dan pemandu wisata) dapat berkembang</li> <li>3. Kota Bogor dapat menciptakan produk yang menonjolkan ciri khas Kota Bogor</li> <li>4. Letak Strategis kota Bogor sebagai kota penyangga Ibukota menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata terdekat dari Ibu Kota Jakarta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggali nilai lebih dan ciri khas kota Bogor agar dapat dikemas dalam konsep pariwisata dengan topik tertentu.</li> <li>2. Meningkatkan dan mengembangkan fitur yang ada di BogorHitz dan menghimbau agar UMKM dan masyarakat menggunakan platform tersebut dan menggunakan produk asli kota Bogor.</li> <li>3. Mendukung penciptaan inovasi dan kreatifitas yang menonjolkan ciri khas kota Bogor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program bantuan <i>tourism branding</i> untuk destinasi wisata di Bogor</li> <li>2. Melakukan promosi digital pariwisata</li> <li>3. Membuat program cinta budaya Bogor dengan himbauan kepada masyarakat Bogor untuk menggunakan produk-produk lokal Bogor</li> <li>4. Melengkapi sarpras ramah anak dan kaum disabilitas pada lokasi-lokasi wisata.</li> <li>5. Menyediakan lokasi lokasi <i>instagramable</i> di setiap sudut kota.</li> </ol>
<b>Ancaman</b>	<b>Strategi Ancaman dan Kekuatan</b>	<b>Strategi Kelemahan dan Ancaman</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan pusat UMKM dan Pusat Budaya perlu dilakukan kota Bogor</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi Kota Bogor cukup strategis, banyak pendatang membuat kota Bogor semakin padat</li> <li>2. Degradasi moral dan budaya Kota Bogor menjadi ancaman yang serius</li> <li>3. Berkurangnya kepercayaan stakeholder bidang pariwisata.</li> <li>4. Dampak Pandemi Covid yang menyebabkan kondisi pariwisata susah untuk bangkit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat ajakan cinta produk dan budaya lokal sebagai bagian dari menjaga warisan budaya.</li> <li>2. Melibatkan produk produk lokal yang mendukung setiap kegiatan di kota Bogor.</li> <li>3. Melakukan pendampingan dan dukungan kepada lokasi lokasi wisata untuk recovery dari kondisi pandemi.</li> <li>4. Menjalankan dan menghimbau semua titik pariwisata untuk patuh terhadap protokol Kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Event-event budaya dilakukan terjadwal untuk mempertahankan warisan budaya</li> </ol>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategi TOWS Smart Branding dapat dilihat sebagai berikut:

1. Menggali nilai lebih dan ciri khas kota Bogor agar dapat dikemas dalam konsep pariwisata dengan topik tertentu
2. Meningkatkan dan mengembangkan fitur yang ada di BogorHitz dan menghimbau agar UMKM dan masyarakat menggunakan platform tersebut dan menggunakan produk asli kota Bogor.
3. Mendukung penciptaan inovasi dan kreatifitas yang menonjolkan ciri khas kota Bogor.
4. Program bantuan *tourism branding* untuk destinasi wisata di Bogor
5. Menyediakan lokasi lokasi instagramable di setiap sudut kota.
6. Melakukan promosi digital pariwisata
7. Membuat program cinta budaya Bogor dengan himbauan kepada masyarakat Bogor untuk menggunakan produk-produk lokal Bogor
8. Melengkapi sarpras ramah anak dan kaum disabilitas pada lokasi-lokasi wisata.
9. Membuat ajakan cinta produk dan budaya lokal sebagai bagian dari menjaga warisan budaya.
10. Melibatkan produk produk lokal yang mendukung setiap kegiatan di kota Bogor.



11. Melakukan pendampingan dan dukungan kepada lokasi lokasi wisata untuk recovery dari kondisi pandemi.
12. Menjalankan dan menhimbau semua titik pariwisata untuk patuh terhadap protokol Kesehatan
13. Penataan pusat UMKM dan Pusat Budaya perlu dilakukan kota Bogor
14. Event-event budaya dilakukan terjadwal untuk mempertahankan warisan budaya

#### 4.3.3. Analisis TOWS *Smart Economy*

TOWS Smart Governance terkait dengan Pelayanan Publik, manajemen birokrasi yang efisien dan efisiensi kebijakan publik

*Tabel 4. 4 TOWS Smart Economy*

<b>Analisis TOWS</b>		
	<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
<b>Faktor Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Bogor merupakan kota tujuan wisata dan tujuan kuliner</li> <li>2. Sudah terbina lebih dari 20 inovasi daerah (IGA Kemendagri) dan banyak produk indikasi geografis</li> <li>3. Perizinan dipermudah dengan aplikasi SMART</li> <li>4. Transaksi Non Tunai untuk keuangan daerah (penghargaan dalam Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses keuangan terutama permodalan bagi UMKM harus ditingkatkan</li> <li>2. Pemasaran digital yang dilakukan pelaku ekonomi kreatif belum optimal</li> <li>3. Banyak produk ekonomi kreatif yang belum memiliki keunikan dan daya saing</li> <li>4. Sinergi berbagai Dinas yang menangani permasalahan ekonomi (contoh Disperindag) masih harus diperkuat.</li> <li>5. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penatausahaan keuangan, pengawasan dan pelaporan.</li> </ol>
<b>Faktor Eksternal</b>		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Sudah menggunakan aplikasi untuk penatausahaan persediaan dan keuangan daerah lainnya.</li> <li>6. Kemandirian ekonomi dari PAD sudah baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peningkatan angka pengangguran kota Bogor tahun 2021</li> </ol>
<p><b>Peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Literasi digital masyarakat sudah tinggi, 87% menggunakan smartphone, mayoritas sudah mahir menggunakan internet dan bertransaksi secara daring</li> <li>2. Banyak industri dan badan usaha di sektor swasta yang dapat dilibatkan untuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha</li> </ol>	<p><b>Strategi Peluang dan Kekuatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan inovasi daerah termasuk jumlah paten dan produk unggulan daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi</li> <li>2. Peningkatan literasi digital masyarakat kota Bogor untuk semakin meningkatkan transaksi non tunai, seperti penggunaan QRIS</li> <li>3. Peningkatan kerja sama dengan sektor swasta (CSR dan lain-lain) dalam pengembangan UMKM seperti permodalan, pemasaran, peningkatan kompetensi, dll</li> <li>4. Peningkatan kerjasama incubator bisnis dengan perguruan tinggi dan swasta</li> <li>5. Pendirian pusat-pusat Kawasan ekonomi kreatif sebagai destinasi wisata belanja baru</li> <li>6. Pembuatan digital map sebagai bentuk promosi destinasi wisata kreatif dan basis data ekonomi kreatif.</li> </ol>	<p><b>Strategi Kelemahan dan Peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan budaya Kerjasama dan solid untuk menciptakan pelayanan di bidang Smart Economy yang efisien dan efektif terpadu, misalnya perizinan, HAKI, dsb,</li> <li>2. Peningkatan akses keuangan dan permodalan terutama untuk masyarakat yang belum <i>bankable</i> dengan menggunakan <i>crowdfunding</i> dikoordinir oleh Dinas/OPD terkait.</li> <li>3. Peningkatan akses keuangan dan permodalan dengan kemitraan yang dikoordinir oleh Dinas/OPD terkait.</li> <li>4. Peningkatan keterampilan dalam pengembangan produk berbasis digital</li> <li>5. Mengintegrasikan sistem informasi perencanaan, penatausahaan keuangan, pengawasan dan pelaporan</li> <li>6. Syarat dan peraturan tegas kepada investor untuk mengoptimalkan tenaga kerja lokal</li> <li>7. Sosialisasi legalitas badan usaha dan HAKI</li> </ol>

Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekonomi dunia mengalami ketidakpastian yang dapat mengganggu pada akses bahan baku</li> <li>2. Perekonomian dunia dan nasional masih fluktuatif, sehingga diperlukan perluasan pasar untuk mengurangi ketergantungan pada segmen pasar tertentu</li> <li>3. Masuknya produk-produk dari luar kota Bogor</li> <li>4. Sampah yang dihasilkan aktivitas ekonomi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasaran produk unggulan daerah ke luar Kota Bogor dikoordinir/didampingi oleh OPD terkait baik melalui portal <i>e-commerce</i> maupun pameran <i>offline</i>.</li> <li>2. Membuka peluang investasi</li> <li>3. Kerjasama penyediaan bahan baku dengan industri swasta dikoordinir oleh Dinas terkait</li> <li>4. Meningkatkan kerjasama dengan LSM dalam pelatihan pembuatan produk ramah lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasaran produk unggulan daerah ke luar Kota Bogor dikoordinir/didampingi oleh OPD terkait baik melalui portal <i>e-commerce</i> maupun pameran <i>offline</i>.</li> <li>2. Sosialisasi legalitas badan usaha dan HAKI</li> <li>3. Menggalakkan kampanye bangga menggunakan produk local Bogor (#BogorLocalPride) untuk mengembangkan tumbuhnya bisnis digital dan persaingan yang sehat.</li> </ol>

Strategi TOWS *Smart Economy* dapat dilihat sebagai berikut:

1. Peningkatan inovasi daerah termasuk jumlah paten dan produk unggulan daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi
2. Peningkatan literasi digital masyarakat kota Bogor untuk semakin meningkatkan transaksi non tunai seperti penggunaan QRIS
3. Pendirian pusat-pusat Kawasan ekonomi kreatif sebagai destinasi wisata belanja baru
4. Peningkatan kerja sama dengan sektor swasta (CSR dan lainnya) dalam pengembangan UMKM seperti permodalan, pemasaran, peningkatan kompetensi, dan lain-lain
5. Peningkatan kerjasama inkubator bisnis dengan perguruan tinggi dan swasta
6. Pembangunan budaya Kerjasama dan solid untuk menciptakan pelayanan di bidang Smart Economy yang efisien dan efektif terpadu, misalnya perizinan, HAKI, dsb,.
7. Syarat dan peraturan tegas kepada investor untuk mengoptimalkan tenaga kerja lokal

8. Peningkatan akses keuangan dan permodalan terutama untuk masyarakat yang belum bankable dengan menggunakan *crowdfunding* dikoordinir oleh Dinas/OPD terkait.
9. Peningkatan akses keuangan dan permodalan dengan kemitraan yang dikoordinir oleh Dinas/OPD terkait.
10. Pemasaran produk unggulan daerah ke luar Kota Bogor dikoordinir oleh OPD terkait baik melalui portal *e-commerce* maupun pameran *offline*.
11. Membuka peluang investasi
12. Kerjasama penyediaan bahan baku dengan industri swasta dikoordinir oleh Dinas terkait
13. Meningkatkan kerjasama dengan LSM dalam pelatihan pembuatan produk ramah lingkungan
14. Mengintegrasikan sistem informasi perencanaan penatausahaan keuangan, pengawasan dan pelaporan untuk memudahkan evaluasi.
15. Sosialisasi legalitas badan usaha dan HAKI
16. Menggalakkan kampanye bangga menggunakan produk local Bogor (*#BogorLocalPride*) untuk mengembangkan tumbuhnya bisnis digital dan persaingan yang sehat.

#### 4.3.4. Analisis TOWS Smart Living

TOWS Smart Living terkait dengan harmonisasi tata ruang wilayah, prasarana kesehatan dan mobilitas

*Tabel 4. 5 TOWS Smart Living*

Analisis TOWS		
<b>Faktor Internal</b>	<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>

<b>Faktor Eksternal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah ada Perda/Perwali penataan ruang, RDTR</li> <li>2. Sudah ada berbagai sistem informasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</li> <li>3. Sudah ada berbagai sistem informasi di bidang Kesehatan</li> <li>4. Sudah ada transportasi umum yang cukup memadai</li> <li>5. Ketersediaan Smart Street Lighting</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih banyak fasilitas kota yang belum ramah difabel, ramah anak dan ramah lansia</li> <li>2. Banyak aplikasi yang belum terintegrasi baik aplikasi Kesehatan maupun penataan ruang</li> <li>3. Belum ada regulasi yang mewajibkan kendaraan pribadi melakukan uji emisi</li> <li>4. Transportasi umum masih sulit di beberapa wilayah</li> <li>5. Kemacetan sangat tinggi di pusat kota</li> </ol>
<b>Peluang</b>	<b>Strategi Peluang dan Kekuatan</b>	<b>Strategi Kelemahan dan Peluang</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan electric vehicle semakin meluas</li> <li>2. Pengurangan emisi bahan bakar dengan BBG</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan penerangan jalan umum yang lebih optimal bekerja sama dengan perangkat daerah setempat terkait kebutuhan penerangan jalan di wilayah masing-masing</li> <li>2. Integrasi berbagai sistem informasi yang ada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan Standar Emisi kendaraan pribadi</li> <li>2. Meningkatkan penggunaan kendaraan listrik</li> <li>3. Meningkatkan konversi ke kendaraan dengan BBG</li> <li>4. Peningkatan fasilitas kota ramah difabel, ramah anak dan ramah lansia</li> <li>5. Luasan Ruang Terbuka Hijau yang sulit bertambah</li> </ol>
<b>Ancaman</b>	<b>Strategi Ancaman dan Kekuatan</b>	<b>Strategi Kelemahan dan Ancaman</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kendaraan semakin banyak karena produksi kendaraan pribadi meningkat dan persaingan di dunia otomotif yang tinggi</li> <li>2. Penyediaan listrik untuk kendaraan listrik masih terbatas</li> <li>3. Ketergantungan pada aplikasi dari pusat yang seringkali tidak memiliki support yang baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan sistem transportasi terpadu dengan manajemen rekayasa lalu lintas</li> <li>2. Penertiban dan sosialisasi kepada masyarakat pengguna kendaraan pribadi untuk mengutamakan penggunaan transportasi umum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan sistem transportasi umum yang dengan bis kecil untuk mengurangi kemacetan</li> <li>2. Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau yang sulit bertambah</li> <li>3. Meningkatkan cakupan penyediaan air bersih</li> </ol>

4. Peningkatan jumlah penduduk membutuhkan daya dukung sumber air bersih	3. Melakukan pendekatan dengan pengampu aplikasi pusat untuk mendapatkan support yang baik	
--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--

Strategi TOWS Smart Living dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengelolaan penerangan jalan umum yang lebih optimal bekerja sama dengan perangkat daerah setempat terkait kebutuhan penerangan jalan di wilayah masing-masing
2. Integrasi berbagai sistem informasi yang ada
3. Menetapkan Standar Emisi kendaraan pribadi
4. Meningkatkan penggunaan kendaraan listrik
5. Meningkatkan konversi ke kendaraan dengan BBG
6. Peningkatan fasilitas kota ramah difabel, ramah anak dan ramah lansia
7. Luasan Ruang Terbuka Hijau yang sulit bertambah
8. Menciptakan sistem transportasi terpadu dengan manajemen rekayasa lalu lintas
9. Penertiban dan sosialisasi kepada masyarakat pengguna kendaraan pribadi untuk mengutamakan penggunaan transportasi umum
10. Melakukan pendekatan dengan pengampu aplikasi pusat untuk mendapatkan support yang baik
11. Menciptakan sistem transportasi umum yang dengan bis kecil untuk mengurangi kemacetan
12. Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau yang sulit bertambah
13. Meningkatkan cakupan penyediaan air bersih

### 4.3.5. Analisis TOWS Smart Society

TOWS Smart Society terkait dengan interaksi masyarakat (komunitas), ekosistem belajar dan sistem keamanan masyarakat

Tabel 4. 6 TOWS Smart Society

Analisis TOWS		
<b>Faktor Internal</b>	<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekolah dan Pendidikan non formal sudah baik</li> <li>2. Sudah ada sistem keamanan masyarakat dengan CCTV dan <i>panic button</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minat membaca masyarakat yang rendah</li> <li>2. Anggaran yang minim</li> <li>3. Masyarakat tidak menyaring informasi HOAX atau ujaran kebencian</li> </ol>
<b>Faktor Eksternal</b>		
<b>Peluang</b>	<b>Strategi Peluang dan Kekuatan</b>	<b>Strategi Kelemahan dan Peluang</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan internet untuk e-learning dan e-library</li> <li>2. Teknologi yang memungkinkan peningkatan keamanan masyarakat (COC, dsb)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan penyelenggaraan e-learning untuk masyarakat baik pendidikan non-formal maupun Pendidikan formal melalui Kurikulum Merdeka</li> <li>2. Menyediakan system <i>call center</i> dan system fast-respon</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan e-library yang terkoneksi dengan perpustakaan-perpustakaan besar</li> </ol>
<b>Ancaman</b>	<b>Strategi Ancaman dan Kekuatan</b>	<b>Strategi Kelemahan dan Ancaman</b>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin banyak aplikasi di internet yang merugikan masyarakat</li> <li>2. Kondisi wabah penyakit yang belum selesai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan literasi masyarakat untuk cerdas menggunakan berbagai aplikasi</li> <li>2. Meningkatkan awareness masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kota Bogor berbasis aplikasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan literasi digital dengan program sosialisasi terutama digital ethics dan digital security</li> </ol>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategi TOWS Smart Society dapat dilihat sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelenggaraan e-learning untuk masyarakat baik pendidikan non-formal maupun Pendidikan formal melalui Kurikulum Merdeka
2. Menyediakan system call center dan system fast-respon
3. Pembuatan e-library yang terkoneksi dengan perpustakaan-perpustakaan besar
4. Peningkatan literasi digital dengan program sosialisasi terutama *digital ethics* dan *digital security*



#### 4.3.6. Analisis TOWS *Smart Environment*

TOWS Smart Environment terkait dengan perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan tata kelola energi

Tabel 4. 7 TOWS *Smart Environment*

Analisis TOWS		
<b>Faktor Internal</b>	<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
<b>Faktor Eksternal</b>		
<b>Peluang</b>	<b>Strategi Peluang dan Kekuatan</b>	<b>Strategi Kelemahan dan Peluang</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan teknologi untuk mengolah sampah di TPA menjadi energi (PLTSa)</li> <li>Pemanfaatan limbah Minyak nabati menjadi sumber bahan bakar kendaraan diesel (biodiesel)</li> <li>Pemanfaatan tenaga aliran sungai sebagai sumber tenaga listrik skala kecil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Tata Kelola Sampah dan Limbah rumah tangga, industri dan sampah publik diantaranya :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama produksi biodiesel dengan sektor swasta</li> <li>Kerjasama pendirian PLTMH misalnya dalam bentuk CSR industri</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan sampah dengan pendekatan <i>circular economy</i></li> <li>Pembinaan terhadap TPS-TPS level RW</li> </ol>

4. Pemanfaatan tenaga surya pada sarana umum dan industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Penggunaan sel surya untuk sarana umum (Smart Street Lighting/PJU cerdas)</li> <li>d. Pemberian insentif bagi industri yang menggunakan sel surya untuk kebutuhan internalnya</li> </ul>	
<b>Ancaman</b>	<b>Strategi Ancaman dan Kekuatan</b>	<b>Strategi Kelemahan dan Ancaman</b>
1. Bahaya penyakit dan pencemaran air sungai akibat tidak adanya saluran air limbah	1. Melibatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Septic tank komunal,</li> <li>2. Peningkatan jangkauan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat</li> </ul>

Strategi TOWS Smart Environment dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengembangan Tata Kelola Sampah dan Limbah rumah tangga, industri dan sampah publik
2. Pengolahan sampah dengan pendekatan circular economy
3. Pembinaan terhadap TPS-TPS level RW
4. Melibatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
5. Septic tank komunal
6. Peningkatan jangkauan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

## 5. ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY

---

### 5.1. Visi dan Misi Smart City

Pada bagian ini akan dijelaskan dan diuraikan visi dan misi Smart City Kota Bogor sebagai landasan perumusan rumusan sasaran target capaian pembangunan Smart City. Visi dan Misi Smart City dibuat dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Visi dan Misi Pembangunan Nasional
2. Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang tercantum di dalam dokumen RJPMD
3. Harapan warga masyarakat
4. Analisis faktor eksternal di masa depan.

#### 5.1.1. Visi Smart City kota Bogor

Visi Pembangunan Nasional Indonesia 2005 s.d 2025 adalah

**” Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur ”**<sup>52</sup>,

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (RPJP Nasional).

RPJPD Propinsi Jawa Barat 2005-2025 (Perda Propinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010)

**Visi : ”Dengan Iman dan Takwa, Propinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”**

Misi :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah,

---

<sup>52</sup> <https://www.bpkp.go.id/berita/read/2208/13290/Sosialisasi-Rencana-Pembangunan-Jangka-Panjang-Nasional>

3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan

Berdasarkan RPJPD Kota Bogor 2005-2025 (Perda Kota Bogor Nomor 7 tahun 2009)

Visi : **“Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah”**

Visi tersebut mengandung makna:

1. Kota Jasa mengandung pengertian bahwa Kota Bogor menjadi pusat jasa dalam pengertian pelayanan (*services*) dan sektor ekonomi tersier (*economic activities*). Kota Bogor akan diarahkan untuk menjadi suatu kota yang aktivitas masyarakatnya bergerak terutama di sektor jasa. Sektor jasa merupakan sektor yang mendukung bagi berkembangnya aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat baik aktivitas budaya, ekonomi, penataan fisik kota, maupun penanganan masalah kota. Sektor ini perlu diprioritaskan untuk mendorong perekonomian Kota Bogor, terutama pada sub sektor jasa perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa pendidikan serta jasa-jasa lainnya
2. Nyaman berarti bahwa Kota Bogor diharapkan menjadi kota yang bersih, indah, tertib dan aman serta berwawasan lingkungan
3. Masyarakat madani berarti bahwa masyarakat Kota Bogor harus memiliki derajat kualitas kehidupan yang tinggi baik dari segi keimanan, pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang tercermin dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama dari Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan daya beli masyarakat (*Purchasing Power Parity*).
4. Pemerintahan amanah yaitu pemerintahan yang baik yang senantiasa mengacu kepada kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan terwujudnya pelayanan publik yang prima di segala bidang serta terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bogor.

Misi :

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada
2. Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman (beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera
4. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum

Sebagaimana tercantum dalam Perubahan RJPMD 2019 - 2024, (RPJPD 2005-2025) Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Bogor, yang ingin dicapai adalah:

**“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”**

Kota Bogor, meliputi seluruh wilayah dan isinya, dalam arti Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Kota Bogor.

Kota Yang Ramah Keluarga dapat diartikan sebagai berikut:

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, pendidikan, sosial masyarakat serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Tiga Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019- 2024 adalah:

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas
3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Berbagai permasalahan daerah baik dari sisi pelayanan publik, ketersediaan data penunjang perancangan kebijakan, daya saing bisnis dan pariwisata, kesejahteraan dan ekonomi, bisnis, kesehatan, transportasi, pendidikan, keamanan, lingkungan hidup dan energi dapat disolusikan secara bertahap dengan implementasi Rencana Induk dan Peta Jalan *Smart City* yang dapat memaksimalkan potensi daerah dengan pemanfaatan teknologi yang tepat guna.

Sehingga Visi Smart City kota Bogor 2023 -2027 adalah:

**“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota warisan budaya yang cerdas dan sejahtera pada tahun 2027”**

Visi tersebut memiliki 3 kata kunci yaitu Warisan budaya, Cerdas dan Sejahtera, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Warisan budaya** dimaksudkan kota Bogor yang memiliki kekuatan warisan budaya dari para leluhur. Bogor berkaitan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang memerintah di wilayah tersebut, salah satunya adalah Kerajaan Padjajaran yang rajanya terkenal dengan suatu ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi yang mengejar kesejahteraan, selain kerajaan banyak juga pusaka-pusaka berharga dan karunia keindahan alam di kota Bogor yang menjadikan Bogor sebagai *cultur heritage city*. *Heritage* atau warisan budaya selalu akan terkait dengan tertariknya turis (lokal dan luar), penciptaan pekerjaan baru, warisan budaya akan terkait dengan proses perlindungan terhadap lingkungan dan peninggalan budaya yang perlu dilestarikan, dan warisan budaya akan meningkatkan rasa cinta dan memiliki masyarakat terhadap kota Bogor.
2. **Cerdas** dimaksudkan bahwa Kota Bogor akan menjadi kota warisan budaya yang menerapkan kecerdasan (berbasis digital) dalam pembangunan daerahnya yang bertujuan untuk mencapai masyarakat sejahtera sesuai dengan Visi Nasional dan Visi RPJMD 2019-2024.

3. **Sejahtera** dimaksudkan bahwa Kota Bogor akan menjadi kota warisan budaya yang dapat mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan Visi Nasional dan Visi RPJMD 2019-2024

### 5.1.2. Misi Smart City kota Bogor

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi ” **Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota warisan budaya yang cerdas dan sejahtera pada tahun 2027**” diperlukan beberapa misi. Misi harus memiliki unsur mengenai tujuan, strategi dan nilai-nilai yang dimiliki oleh kota Bogor. Sehingga misi Smart City kota Bogor adalah:

1. Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Warisan Budaya  
Membangun kota warisan budaya yang mengedepankan kekhasan dan keistimewaan penataan kota melalui bangunan, prasasti dan arsitektur, ikon budaya serta tradisi Kerajaan Padjajaran.
2. Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Cerdas  
Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi, informasi, komunikasi serta mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk masyarakat Kota Bogor
3. Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Sejahtera  
Memberikan kualitas hidup yang lebih baik dan kenyamanan bagi masyarakat Kota Bogor

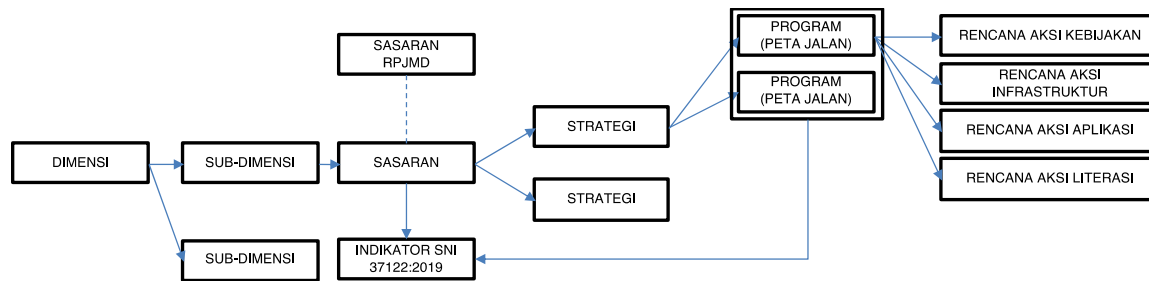
### 5.2.Sasaran Smart City Daerah

Setelah pernyataan visi dan misi Smart City daerah tersusun, tahapan selanjutnya adalah menerjemahkan visi Smart City tersebut ke dalam ukuran capaian keberhasilan yang disusun di dalam sasaran Smart City daerah. Sasaran Smart City daerah merupakan rangkaian indikator keberhasilan yang menjadi alat ukur dalam evaluasi pelaksanaan Smart City.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan, khususnya RPJMD, RPJPD dapat disusun dalam sebuah peta keterkaitan sebagaimana yang terlihat pada Gambar 1. Terlihat bahwa keterkaitan antara Rencana Induk Smart City, RPJMD, RPJPD dapat terjadi pada tingkat sasaran, yaitu antara sasaran

Smart City daerah, sasaran RPJMD dan RPJPD dalam masing-masing sub-dimensi Smart City dari 6 dimensi yang ada.

Sasaran Smart City daerah kemudian dicapai melalui serangkaian strategi dan program Smart City, baik program pada peta jalan maupun ada rencana aksi Smart City daerah, yang akan dikembangkan pada Dokumen 2 yaitu Rencana Induk Smart City Daerah.



Gambar 1 Kerangka Keterkaitan antara Sasaran Smart City dengan RPJMD

Sebuah sasaran Smart City daerah yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. *Specific*, yaitu definisi indikator kinerja Smart City harus jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
2. *Measurable*, yaitu indikator yang digunakan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
3. *Appropriate*, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
4. *Relevant*, yaitu indikator terkait secara logis dengan visi Smart City yang diinginkan serta tugas dan fungsi masing-masing institusi yang bertanggung jawab.
5. *Continuously improved*, yaitu terdapat peningkatan kinerja seiring dengan terlaksananya program-program Smart City.
6. *Cost-effective*, manfaat target capaian kinerja Smart City yang diinginkan sebanding atau dapat dicapai dengan biaya yang harus dialokasikan.

Sasaran Smart City Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel 5.1



Tabel 5. 1 Sasaran Smart City Kota Bogor

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
<b>SMART GOVERNANCE</b>	LAYANAN PUBLIK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan layanan publik (Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbasis Teknologi Informasi (TI) dan Online)</li> <li>2. Peningkatan dan pengembangan sarana penyampaian partisipasi masyarakat berbasis IT dan online (keterlibatan masyarakat)</li> <li>3. Pemanfaatan <i>crowdfunding</i> dan <i>creative funding</i> sebagai sumber pendanaan pembangunan aplikasi dan layanan publik</li> <li>4. Peningkatan skill dan kompetensi SDM Pemerintah daerah di bidang TIK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi 2 Tujuan 2 RPJMD: Terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani (Smart Governance)</li> <li>2. Misi 2 Tujuan 1 RPJMD Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan berkarakter</li> <li>3. Misi 2 Indikator Tujuan 2.1 RPJMD Indeks Reformasi Birokrasi, terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien akuntable.</li> <li>4. Misi 2 Tujuan 1 Indikator Tujuan 1.2, 1.3 Indeks pembangunan pemuda dan Indeks Inovasi Daerah dan Kategori Inovasi Daerah.</li> <li>5. Misi 2 Smart City Kota Bogor Dokumen 1</li> </ol>
	BIROKRASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan <i>digitalisasi</i> administrasi di setiap Dinas</li> <li>2. Integrasi data untuk mendukung manajemen informasi di lingkungan kerja daerah kota Bogor</li> <li>3. Penetapan kebijakan tentang pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi 2 Tujuan 2 RPJMD: Terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani (Smart Governance)</li> <li>2. Misi 2 Indikator Tujuan 2.1 RPJMD Indeks Reformasi Birokrasi, terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien akuntable.</li> </ol>

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
		dan Teknologi Komunikasi Informasi (TIK) di lingkungan daerah kota Bogor	3. Misi 2 Tujuan 2 RPJMD: Terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani (Smart Governance)
	PERANCANGAN KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan portal aplikasi dan perencanaan, penyajian <i>dashboard</i> dan evaluasi untuk pengambilan kebijakan strategis kota Bogor.</li> <li>2. Menyusun SOP penanganan kebutuhan daerah yang tidak tercover oleh kebijakan pusat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi 2 Indikator Tujuan 2.1 RPJMD Indeks Reformasi Birokrasi, terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien akuntable.</li> <li>2. Misi 2, tujuan 2.2 Level kematangan Smart city</li> </ol>
<b>SMART BRANDING</b>	PARIWISATA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan event-event budaya berskala nasional dan internasional secara teratur</li> <li>2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pariwisata melalui pelatihan atau workshop</li> <li>3. Melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya (benda dan tak benda)</li> <li>4. Mengoptimalkan potensi cagar budaya dengan pemanfaatan teknologi digital dan Internet.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</li> <li>2. Misi 2 Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan berkarakter</li> <li>3. Misi 2 Tujuan 2: Terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani</li> <li>4. Misi 2 Tujuan 2: Terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani</li> </ol>
	DAYA SAING BISNIS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pengelolaan pola ruang kota berbasis potensi budaya lokal dan komersial dengan pemanfaatan Internet</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi 2 Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan berkarakter</li> </ol>

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
		<p>2. Pengembangan industri kreatif dan UMKM pengolahan hasil bumi dan kreativitas masyarakat kota Bogor (Pelatihan, dukungan promosi dan pemasaran online)</p>	<p>2. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</p>
	<p>WAJAH (TAMPILAN) KOTA</p>	<p>1. Menata kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai kota Bogor selaras dengan dinamika modernisasi.</p> <p>2. Meningkatkan <i>tourism branding</i> melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi dan Internet</p>	<p>1. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</p> <p>2. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</p>

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
<b><i>SMART ECONOMY</i></b>	<b>EKOSISTEM INDUSTRI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas teknologi pendukung sistem digitalisasi yang menunjang peningkatan mutu produk unggulan Kota Bogor</li> <li>2. Membangun Mitra dengan Masyarakat untuk menciptakan kreatifitas dan inovasi produk unggulan kota Bogor</li> <li>3. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas SDM UMKM, termasuk memfasilitasi akses pasar</li> <li>4. Integrasi antara pelaku usaha dengan manufaktur dan aksesibilitas ke pasar internasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</li> <li>2. Misi 2 Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan berkarakter</li> <li>3. Misi 2 Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan berkarakter</li> <li>4. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</li> </ol>
	<b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan literasi penggunaan Internet dengan bijak</li> <li>2. Pendirian pusat-pusat Kawasan ekonomi kreatif sebagai destinasi wisata belanja baru</li> <li>3. Program ketahanan usaha bagi wirausaha baru dan menengah.</li> <li>4. Menggalakkan kampanye (#BogorLocalPride) untuk mengembangkan tumbuhnya bisnis digital dan persaingan yang sehat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</li> <li>2. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</li> <li>3. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</li> <li>4. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</li> </ol>

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
	EKOSISTEM TRANSAKSI KEUANGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan akses permodalan bagi pelaku usaha dan wirausaha baru.</li> <li>2. Sosialisasi literasi keuangan sehingga dapat memanfaatkan fleksibilitas <i>less cash economy</i></li> <li>3. Integrasi antara pelaku usaha dengan manufaktur dan aksesibilitas ke pasar internasional dengan pemanfaatan <i>e-commerce</i> dan <i>marketplace</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</li> <li>2. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</li> <li>3. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</li> </ol>
<b>SMART LIVING</b>	HARMONISASI TATA RUANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi penataan ruang wilayah dan pembangunan kota Bogor.</li> <li>2. Peningkatan fasilitas kota ramah difabel, ramah anak dan ramah lansia</li> <li>3. Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman dan harmonis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</li> <li>2. Misi 3 Tujuan 1 Tujuan 1 : Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat</li> <li>3. Misi 3 Tujuan 1 Tujuan 1 : Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat</li> </ol>
	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas layanan dan sarana di Puskesmas</li> <li>2. Menjadikan Puskesmas sebagai pusat informasi/penyuluhan kesehatan bagi masyarakat</li> <li>3. Peningkatan akses terhadap sarana olahraga bagi masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi 3 Tujuan 1 Tujuan 1 : Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat</li> <li>2. Misi 3 Tujuan 1 Tujuan 1 : Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat</li> <li>3. Misi 3 Tujuan 1 Tujuan 1 : Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat</li> </ol>
	TRANSPORTASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan sistem transportasi umum yang dengan bis kecil untuk mengurangi kemacetan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</li> </ol>

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
		2. Menciptakan sistem transportasi terpadu dengan manajemen rekayasa lalu lintas	2. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah
<b>SMART SOCIETY</b>	INTERAKSI MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan komunitas adat, komunitas pemuda dan masyarakat untuk mewujudkan partisipasi publik</li> <li>2. Peningkatan keterlibatan masyarakat pemuda dan UMKM dalam pembangunan kota Bogor</li> <li>3. Peningkatan literasi digital dengan program sosialisasi terutama digital ethics dan digital security</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</li> <li>2. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</li> <li>3. Misi 3 Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</li> </ol>
	EKOSISTEM BELAJAR/ PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong peningkatan kompetensi guru dan pengajar</li> <li>2. Peningkatan literasi baca masyarakat melalui penggunaan TIK</li> <li>3. Perbaikan akses infrastruktur digital di sekolah-sekolah untuk peningkatan kompetensi siswa</li> <li>4. Peningkatan penerima beasiswa untuk masyarakat disable</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi 3 Tujuan 1: Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat</li> <li>2. Misi 3 Tujuan 1: Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat</li> <li>3. Misi 3 Tujuan 1: Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat</li> <li>4. Misi 3 Tujuan 1: Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat</li> </ol>
	KEAMANAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan/perbaikan sistem peringatan dini terhadap bencana berbasis teknologi dan informasi.</li> <li>2. Sosialisasi peningkatan kesadaran dalam penanganan sampah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi 3 Tujuan 1: Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat</li> <li>2. Misi 1 Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat kota bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas</li> </ol>

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
		3. Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan untuk menciptakan stabilitas keamanan kondusif	3. Misi 3 Tujuan 1: Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
<b><i>SMART ENVIRON- MENT</i></b>	PROTEKSI LINGKUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sistem tata kelola perlindungan sumberdaya alam berbasis teknologi</li> <li>2. Meningkatkan ruang terbuka hijau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi 1 Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat kota bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas</li> <li>2. Misi 1 Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat kota bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas</li> </ol>
	PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Tata Kelola Sampah dan Limbah rumah tangga, industri dan sampah publik</li> <li>2. Mendorong pemberdayaan TPST, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di masing masing RW</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi 1 Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat kota bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas</li> <li>2. Misi 1 Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat kota bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas</li> </ol>
	TATA KELOLA ENERGI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan energi efisien yang bertanggungjawab</li> <li>2. Mengembangkan energi alternatif ramah lingkungan dan terjangkau oleh masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi 1 Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat kota bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas</li> <li>2. Misi 1 Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat kota bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas</li> </ol>

## 6. PENUTUP

---

Dokumen satu adalah analisis Strategis Smart City Kota Bogor yang dijadikan referensi bagi penyusunan Rencana Induk Smart City Kota Bogor. Dalam Dokumen satu ini dilakukan Analisis Visi Pembangunan Daerah berdasarkan RJPMD, daya saing daerah dan analisis kondisi eksternal terkait politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan. Tahapan selanjutnya adalah Analisis Kesiapan Daerah yaitu nature, struktur, infrastruktur, suprastruktur (Kebijakan & Kelembagaan) dan culture. Analisis kesiapan daerah merupakan landasan analisis gap (kesenjangan), analisis SWOT dan analisis TOWS per dimensi Smart City. Pada akhir Dokumen satu disediakan hasil analisis Visi Pembangunan Smart City hingga Sasaran Smart City Daerah.

Dokumen satu Analisis Strategis Smart City Kota Bogor disusun dengan data yang tersedia dalam dokumen-dokumen dan dikumpulkan dalam Bimtek serta Focus Group Discussion, serta memperhatikan peraturan perundangan yang masih berlaku hingga buku ini disusun.